

SKRIPSI

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**



Nomor Induk Mahasiswa: 105611121319

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administarsi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI MAPPIARE

Nomor Induk Mahasiswa: 105611121319

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Andi Wapriani

Nomor Induk : 105611121319

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui,

Pembimbing I

[Signature]
Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui,

Dekan

[Signature]
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Program Studi

[Signature]
Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan Undangan menguji ujian Skripsi Deskon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0167/FSP/A 4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari sabtu tanggal 29 Juli 2023

TIM PENILAI



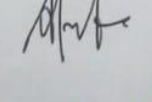

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

A. Lufur Prianto, S.IP., M.Si

PENGUJI

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Dr. Abdi, M.Pd ()
4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Mappiare

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121319

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Andi Mappiare

ABSTRAK

Andi Mappiare 2023, Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar. (Di bimbing Oleh Fatmawati Dan Abdi).

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan publik yang berkembang saat ini dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diadopsi kedalam pelayanan berbasis elektronik. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana indeks penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah website evaluasi SPBE dan studi Pustaka dengan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan alat analisis VOSViewer untuk memetakan dokumen dengan analisis studi pustaka pada kaitannya evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penerapan SPBE dengan mengukur tingkat kematangan pada empat domain dengan 47 sub indikator mencapai nilai indeks 3,71 dengan predikar “Sangat Baik”. Capaian itu didasari pada akumulasi domain kebijakan internal dengan nilai indeks 0,45, domain tata kelola dengan nilai indeks 0,85, domain manajemen dengan nilai indeks 0,53, dan domain layanan dengan nilai indeks 1,89. Sehingga pada evaluasi SPBE di Diskominfo Kota Makassar mengalami peningkatan target penerapan SPBE menjadi “sangat baik” yang menjadi peningkatan yang signifikan dalam penerapan SPBE. Sejalan dengan hasil citasi dokumen penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan *e-government* memiliki relevansi terhadap temuan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE).

Kata kunci: evaluasi, SPBE, pelayanan, peningkatan, indeks

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar”*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi, M. Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak/Ibu dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas

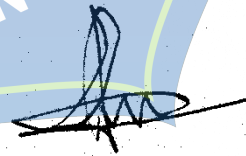
Muhammadiyah Makassar.

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh penguji pada seminar proposal, seminar hasil dan ujian tutup yang telah banyak memberikan masukan mengenai kebutuhan dalam penelitian kami.
10. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
11. Lili Indri Ani yang telah banyak bersabar menemani dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi dari awal sampai pada titik ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di UNISMUH MAKASSAR yang tidak muat bila dicantumkan dalam ruang yang terbatas ini. Kepada seluruh pihak tanpa terkecuali penulis ucapkan banyak terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 19 Juli 2023



Andi Mappiare

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENERIMAAN TIM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Teori dan Konsep.....	11
2. Konsep SPBE.....	19
C. Kerangka Pikir.....	25
D. Fokus Penelitian.....	26
E. Deskripsi Fokus.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisa Data.....	39
G. Desain Penelitian.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi lokasi penelitian	41
B. Hasil penelitian	41
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong negara maju maupun negara berkembang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk di implementasikan dalam pemerintahan yang biasa disebut elektronik *government (E-Government)*, yang berorientasi pada pelayanan yang efektif dan efisien (Kanaan et al., 2023). Pelayanan publik menjadi sebuah bidang yang berkembang secara signifikan melalui pemanfaatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal tersebut dikembangkan pada *e-government* telah merubah pelayanan publik di seluruh dunia dari pelayanan public yang konvensional menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Perkembangan teknologi dalam pemanfaatan di pemerintahan pertama kali berdiri di Amerika tahun 1993 dengan tujuan untuk mereformasi proses pemerintahan yang lebih efisien (Kurfali et al., 2017). Transformasi birokrasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal penting dan mutlak digunakan di Era digitalisasi pada penerapan *e-government* dengan memberikan tawaran kemudahan dan akses yang langsung dan cepat (Rais et al., 2021).

Penggunaan TIK dalam pelayanan publik meningkatkan efisiensi yang menjadi konsep *e-government*. Idealnya mampu mengurangi biaya, efisiensi waktu, meningkatkan operasi dan menjangkau warga negara secara luas (Abu-Shanab, 2020). *E-government* menciptakan peluang baru bagi pemerintah

untuk melakukan pelayanan yang menginformasikan pemangku kepentingan dengan perbaikan kualitas, akuntabilitas dan efisiensi (Malodia et al., 2021). Idealnya pengembangan *e-government* diharapkan mampu membantu meningkatkan interaksi antar pemerintah, publik, dan bisnis yang mendorong perkembangan ekonomi dan politik (Amalia, 2021). *E-government* berperan dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan (Lessa, 2019).

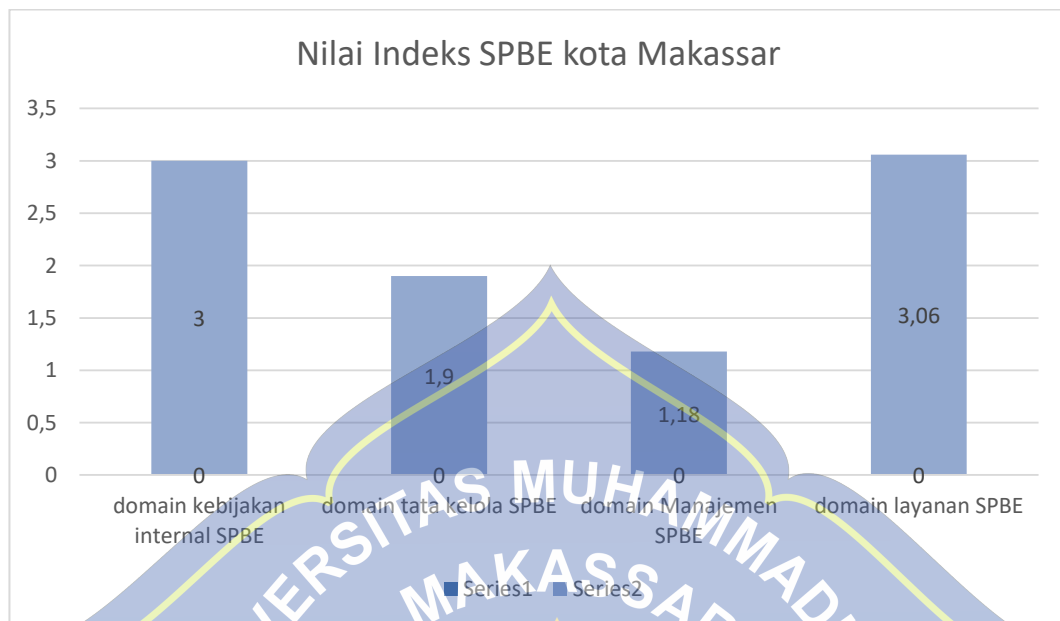
Indonesia terdiri dari beragam provinsi yang telah mengembangkan teknologi informasi yang saling terhubung dengan kemudahan akses melalui alat telekomunikasi (Ayu et al., 2022). Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat menuntun adanya penetrasi internet yang menjangkau sampai tingkat pedesaan. Fokusnya bagaimana mereformasi struktur dan prosedur organisasi dengan adanya modernisasi yang luas dalam mengembangkan Teknologi (Kurniati et al., 2021). Dalam literturnya *e-government* terintegrasi yang terpusat pada warga Negara menjadi indikator yang penting dari keberadaan *e-government* yang matang. Hal tersebut mengacu pada sejauh mana suatu pemerintah disuatu Negara mampu membangun jaringan yang terkoneksi (Khan & Krishnan, 2019). Oleh karena itu perlu adanya penyediaan infrastruktur dalam menyediakan layanan elektronik oleh pemerintah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Alshaher, 2020). Model pemerintahan elektronik biasanya terdiri dari lima tahap Pertama, publikasi informasi di situs web. kedua, komunikasi dengan warga melalui saluran elektronik. Ketiga, menawarkan transaksi online. Keempat penyelenggaraan layanan *e-government* terintegrasi. Kelima, pelibatan warna

negara dalam pengambilan keputusan (Chasin & Scholta, 2015). Dalam implementasi pelayanan publik pada pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat melalui kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-government* (Bouty et al., 2019).

Tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel (Bouty et al., 2019). Hal tersebut menjadi dasar pembangunan *e-government* untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui proses pemerintahan dan adanya hubungan interaksi dua arah antar masyarakat dan pemerintah (Yudianto, 2021). Secara umum pemanfaatan TIK dalam menunjang pelayanan publik tertuang dalam peraturan Presiden No. 3 Tahun 2003 melalui Menteri Informasi dan Komunikasi. Kemudian dilanjutkan peraturan pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu kemajuan teknologi informasi adalah adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memberikan pelayanan terbaik (Ayu et al., 2022).

Berbagai penelitian mengenai *e-government* sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian ini telah dilakukan di beberapa negara, seperti di Ghana (Osei-Kojo, 2017), Irak dan Malaysia (Alshaher, 2020)(Kamaruddin & Noor, 2017). Beberapa penelitian di Indonesia juga telah dilakukan, Namun penelitiannya lebih pada pemanfaatan infrastruktur, integrasi dan implementasi. Dan kota Makassar menjadi kota yang menerapkan smart city tentunya dicapai melalui pengembangan teknologi yang di implementasikan dalam *e-government*.

Kota Makassar dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik mencapai indeks 2,45 dengan Predikat “Cukup”. Hal tersebut jauh dari standar yang telah ditetapkan dalam penerapan SPBE dan juga sedikit peneliti melakukan penelitian yang mengangkat soal evaluasi. Untuk memenuhi indeks SPBE terdapat 4 domain indikator capaian yaitu: *Pertama*, domain kebijakan internal memiliki aspek capaian yaitu kebijakan tata kelola. *Kedua*, domain tata kelola memiliki aspek capaian yaitu kelembagaan/penyelenggara dan perencanaan dan strategi, dan strategi TIK. *Ketiga*, domain manajemen memiliki aspek capaian yaitu penerapan manajemen dan audit TIK. *Keempat*, domain layanan memiliki aspek capaian yaitu administrasi pemerintah dan layanan publik. Peneliti melakukan evaluasi terhadap ke empat domain tersebut, Karena beberapa instansi pemerintah terkadang hanya melaksanakan proses layanan publik berbasis elektronik hanya untuk sementara saja. Setelah dicek ternyata tidak ada keberlanjutan proses layanan online. Hal tersebut membuat peneliti melakukan uji tingkat kematangan domain layanan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain layanan. Sejalan dengan hal tersebut hasil evaluasi penerapan publik berbasis elektronik di kota makassar dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1
Hasil pemantauan indeks SPBE Kota Makassar 2022

Gambar 1. Dari hasil pemantauan evaluasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Makassar. Ditemukan bahwa pada domain kebijakan internal SPBE mencapai nilai indeks 3.00. domain tata kelola SPBE mencapai nilai indeks 1,9. Domain manajemen SPBE mencapai nilai indeks 1,18. Dan domain layanan SPBE mencapai nilai indeks 3,06. Disimpulkan dari hasil evaluasi SPBE di Kota Makassar ternyata mencapai indeks SPBE sebesar 2,45 dengan predikat “Cukup” (Laporan hasil pemantaun evaluasi kota makassar).

Sehingga sejalan dengan informasi tersebut, penelitian ini meneliti evaluasi penerapan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk melihat sejauh mana tingkat kematangan indeks domain kebijakan, layanan, tata Kelola, manajemen pada implementasi *government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dirampung dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana indeks perolehan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui indeks perolehan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengembangan studi Ilmu Administrasi Negara dalam pengembangan tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan yaitu:

- a. Pemanfaatan ini memberikan informasi penting bagi peneliti tingkat lanjut untuk memahami penelitian terkait tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar agar dapat digunakan sebagai referensi akademik sesuai kaidah-kaidah penelitian yang digunakan.
- b. Untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu administrasi Negara khususnya dalam penerapan tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan pemerintahan berbasis elektronik

No	Nama Penulis/tahun/judul	Masalah	Metode	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Fadhi Ramli (2020), Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di Dinas komunikasi dan informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Penilaian sistem informasi berbasis elektronik masih jauh dari target indeks SPBE yang hanya mencapai angka 1,24 dengan predikat kurang	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi	Implementasi SPBE di Kota Palu sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor penghambat pada pelaksanaannya. banyaknya jenis pelayanan elektronik yang tersedia namun tidak terintegrasi, kurangnya SDM di bidang IT, dan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan SPBE di Kota Palu
2.	Abd. Aziz Bouty, (2019), Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kematangan penyelenggaraan pada instansi	Metode yang digunakan menggunakan metode survei, dengan tahapan	penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah Kota Gorontalo

	menggunakan e-government maturity model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)	pemerintah	penelitian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, metode evaluasi menggunakan pengukuran tingkat kematangan berdasarkan <i>e-government Maturity Model</i>).	memperoleh predikat BAIK dengan total nilai indeks yang dicapai sebesar 2.88. Beberapa indikator yang memiliki nilai indeks terendah dari hasil pengukuran dan penilaian diinformasikan dalam penelitian ini untuk selanjutnya menjadi rekomendasi perbaikan bagi pemerintah Kota Gorontalo.
3.	Alidiani S Qotrunnisa, (2021) Model arsitektur layanan administrasi pemerintahan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah kuningan	Kuningan masih mencapai kategori cukup dan belum memiliki standarisasi layanan SPBE sehingga belum optimal penerapan SPBE dari segi layanan SPBE	Menggunakan alur perancangan <i>enterprise architecture</i> SPBE dengan tahapan inisiasi, analisis dan perancangan.	Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah Kuningan berada pada kategori cukup dan belum memiliki standarisasi layanan SPBE. Hal ini yang menjadikan belum optimalnya penerapan SPBE dari segi layanan SPBE. layanan administrasi pemerintahan dan matrik bidang/proses bisnis berdasarkan proses bisnis level 0 program prioritas pada

				Pemkab. Kuningan yang mampu meningkatkan mutu pelayanan khususnya internal birokrasi Pemkab.Kuningan
--	--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisis dari Penelitian terdahulu 2022

Pada penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh (Ramli, 2020) dan (Syahrini Qotrunnisa, 2021), ditemukan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam implementasi *e-government* telah berjalan dengan baik, namun masih saja terdapat kendala disebabkan oleh ketersediaan SDM yang masih kurang, regulasi dan Kurangnya integrasi dari berbagai sektor. Akan tetapi di sisi lainnya telah meningkatkan mutu pelayanan publik. Hal itu juga pada penelitian yang di kemukakan oleh (Bouty et al., 2019) menemukan tingkat kematangan sudah mencapai standarisasi SPBE dengan indeks Baik, hal tersebut menjadi suatu capaian dalam pengembangan *e-government*.

Persamaan penelitian yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu melakukan penelitian mengenai penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Namun perbedaannya terletak pada domain yang di uji dimana penelitian saya mengkaji 4 domain dari indeks SPBE sedangkan penelitian sebelumnya hanya Sebagian saja, serta locus penelitian yang berbeda. Letak permasalahan yang ada pada penelitian terdahulu mengenai kurangnya integrasi, SDM, dan regulasi. Sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian ini untuk menguji sejauh mana penerapan SPBE, sehubungan dengan itu kota Makassar mencapai indeks SPBE dengan predikat “CUKUP” dimana berada dibawah standar indeks penerapan

SPBE. Sehingga peneliti melakukan penelitian di salah satu instansi yang berada di Kota Makassar yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Makassar.

B. Teori dan Konsep

1. Teori evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkan kinerjanya (Hajaroh, 2019). Arti penting evaluasi adalah bagaimana melihat Kembali apakah suatu program dan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian diambil sebuah keputusan apakah program dan kebijakan tersebut dapat di teruskan, direvisi, dihentikan atau dirumuskan Kembali sehingga dapat mencapai tujaun, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Menurut William Dunn (2003) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi memberikan

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui Tindakan public, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya termasuk pada perumusan masalah dan rekomendasi. Dalam melakukan evaluasi terdapat kriteria yang dirumuskan menjadi indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Menurut William Dunn, kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

- a) Efektifitas, adalah sesuatu yang berkaitan dengan alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat) atau nilai-nilai diinginkan sampai kepada publik.
- b) Efisien, adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.
- c) Kecukupan, poin ini menyangkut dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Yang termasuk kecukupan yaitu kinerja.
- d) Pemerataan, adalah termasuk kedalam pemerataan/keadilan yaitu akuntabilitas publik. akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

- e) Responsifitas, indikator ini mengacu pada seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung.
- f) Ketetapan, adalah berkenaan dengan pernyataan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat, apakah kebijakan yang telah di implementasikan oleh pemerintah benar-benar mempunyai nilai atau bermanfaat.

Menurut Stufflebeam pada Konsep Evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinfield (1985) yang telah dikembangkan sejak tahun 1965. Evaluasi model ini terdiri dari empat dimensi, yaitu: Context, Input, Process, dan Product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam's (1986), dimana model ini terdiri atas 4 jenis aspek yang dievaluasi yaitu:

- a. Evaluasi Konteks (Context Evaluation), membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan. Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.
- b. Evaluasi Masukan (Input Evaluation), membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

- c. Evaluasi Proses (Process Evaluation), pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, kapan kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.
- d. Evaluasi Produk/Hasil (Product Evaluation), membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang telah dilakukan setelah program telah terlaksana. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini evaluator akan menentukan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

2. Konsep *e-government*

E-government merupakan rangkaian proses dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang di adopsi dalam pemerintahan dan bisnis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat untuk meningkatkan efisien dan efektif. Hal tersebut mampu berorientasi pada pelayanan masyarakat agar mudah mendapatkan informasi (Indrajit, 2006). Pemanfaatan *e-government* juga mampu meningkatkan produktifitas kerja dan

memberikan efisiensi birokrasi dalam mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Konsep tersebut mampu memperbaiki tahapan interaksi antar pemerintah dan masyarakat (*Government to Citizen*), pemerintah dan pemerintah bisnis (*Government to Business Enterprise*), dan (*Inter Agency Relationship*) Hubungan antar pemerintah (Pratiwi et al., 2020).

E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. *e-Government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi (Aprianty, 2016).

E-Government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang merupakan bukti nyata

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *e-government*.

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*. Menurut (Bastian, 2003) *E-Government* dapat digolongkan kedalam 4 tingkatan, yaitu :

- a) Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.
- b) Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail.
- c) Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
- d) Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Sedangkan, *The World Bank Group* mendefinisikan *e-government* sebagai berikut: “*e-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, *Internet* dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (*The World Bank Group*, 2001). UNDP (*United Nation Development Programme*)

juga memberikan definisi tersendiri dengan lebih singkat untuk *e-government*:
“*E-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dari agen pemerintah.”

Setelah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga memberikan definisi akan *e-government*, para ahli pun turut mendefinisikan *e-government*. Zweers and Planque (2001) memberikan definisi :“*e-government* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan” (Indrajit, 2006).

Selain lembaga-lembaga dan para ahli, dalam tiap negara pun mendefinisikan *e-government* secara beragam. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan *e-Government* secara singkat: “*E-government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means.*” (*E-government* mengacu pada penyampaian informasi dan layanan online pemerintah melalui internet atau alat digital lainnya.). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Konsep *e-Government* berkembang karena adanya tiga pemicu utama dilihat dari sejarahnya, yaitu:

a. Era globalisasi

Era globalisasi dewasa ini terjadi percepatan dari kemajuan yang menunjukkan adanya dinamika yang berkembang diantaranya, membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada abad 21 bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global (Indrajit, 2006).

b. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik.

c. Meningkatkan kualitas

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada.

3. Konsep SPBE

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan kepada pengguna SPBE.

a. Tujuan SPBE yaitu:

- 1) Mewudkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.
- 3) Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggara SPBE.

b. Cakupan pelayanan SPBE ada empat bagian:

- 1) G2B (*Government to busnis*) bentuk layanannya, e-procurement dan e-perijinan.

- 2) G2C (*Government to citizen*) bentuk layanannya, e-pengaduan, e-kesehatan, dan e-pendidikan.
- 3) G2E (*Government to employe*) bentuk layanannya, e-kepegawaian dan e-pensiun.
- 4) G2G (*Government to government*) bentuk layanannya, e-Office, e-planing, e-budgeting, e-monev dan e-JDIH.

Adapun proses pemantauan dalam mengukur tingkat kematangan skala 1-5 pada 47 indikator penilaian dalam metode evaluasi terdapat dalam PERMENPANRB 59/2020 yaitu:

1. Kebijakan

Domain kebijakan memiliki aspek tata kelola SPBE dengan indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi manajemen dan audit TIK.

2. Tata Kelola

Domain tata kelola memiliki aspek perencanaan strategi SPBE dengan indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis. Pada aspek teknologi dan komunikasi indikatornya terkait kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE. Pada aspek penyelenggara SPBE indikatornya berkaitan dengan tugas tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE.

3. Manajemen

Domain manajemen memiliki aspek penerapan manajemen SPBE dengan indikator manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE. Pada aspek audit TIK indikatornya mengenai audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE.

4. Layanan

Domain layanan memiliki aspek administrasi pemerintah dengan indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas dan kinerja. Pada aspek layanan publik memiliki indikator berkaitan dengan layanan pengaduan publik, data terbuka, JDH, dan layanan publik unggulan lain.

Adapun tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen dimana level satu artinya rintisan, level dua artinya terkelola, level tiga artinya terdefinisi, level tiga artinya terpadu dan terukur dan level lima artinya optimum. Dan tingkat kematangan layanan pada level satu artinya informasi, level dua artinya interaksi, level tiga artinya transaksi, level 4 artinya kolaborasi, dan level 5 artinya optimum. Tahap pelaksanaan evaluasi SPBE yaitu:

- a) Persiapan dan koordinasi yaitu Melaksanakan persiapan dan koordinasi ke seluruh K/L/D yang dilakukan evaluasi SPBE.
- b) Penilaian mandiri yaitu melakukan penilaian mandiri secara daring oleh asesor internal.
- c) Penilaian dokumen yaitu penilaian dokumen oleh asesor eksternal.

- d) Penilaian interview yaitu klarifikasi hasil isian penilaian dokumen.
- e) Penilaian visitasi yaitu klarifikasi dan validasi kondisi eksisting/lapangan terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.

Metodologi evaluasi SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang di tinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknik SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 level yang masing-masing levelnya dapat menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan penerapan SPBE dibagi dua yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis. Dari kedua tingkat kematangan penerapan SPBE maka dibagi masing menjadi 5 bagian yaitu:

a. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses

1. Rintisan

Rintisan yaitu mengenai pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara tertentu saja.

2. Terkelola

Terkelola yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian indeks pelayanan publik serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandardisasi

Terstandardisasi yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di indeks pelayanan publik serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.

4. Terintegritas dan terukur

Terintegritas dan terukur yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar indeks pelayanan public serta tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

Optimum yaitu pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

b. Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis

- 1) Informasi yaitu layanan SPBE dalam membentuk satu arah.
- 2) Interaksi yaitu layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
- 3) Transaksi yaitu layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
- 4) Kolaborasi yaitu layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.
- 5) Optimalisasi yaitu layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Dalam mengukur tingkat kematangan SPBE sesuai dengan PERMENPANRB 59/2020. Maka skema bobot penilaian dan indikator capaian digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Bobot penilaian indikator domain SPBE

No	Nama Domain	Jumlah Indikator	Bobot (100%)
1	Kebijakan Internal SPBE	10	13%(@1,3%)
2	Tata kelola SPBE	10	25%(@2,5%)
3	Manajemen SPBE	11	16,5%(@1,5%)
4	Layanan SPBE	16	45,5%(@2,75%/@3%)

Sumber: *permenpanrb 2020*

Tabel 3. Dalam menentukan nilai indeks SPBE maka melakukan perhitungan dengan mengalikan antara nilai indeks domain dengan bobot domain dari nilai kumulatif. Sehingga nilai indeks keseluruhan tersebut menjadi nilai indeks SPBE.

Tabel 3
Indeks capaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4.	1,8 – < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Sumber: *Permenpanrb 2020*

Tabel 1. Dalam melakukan evaluasi SPBE terdapat indeks capaian yang menjadi standar dalam menentukan sejauh mana tingkat penerapan SPBE terhadap instansi/lembaga.

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir menjadi konsep yang menggambarkan hubungan antara teori yang satu dengan teori lainnya. Hal itu juga memberikan identifikasi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan teori yang ada. Penerapan *e-government* menjadi konsep utama dalam menjelaskan teori. Kemudian dikerucutkan dengan konsep Evaluasi yang kaitannya dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk mengukur tingkat kematangan dengan tahapan uji tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis. evaluasi dibutuhkan ada empat domain aspek penilaian yang masing-masing memiliki indikator yang kemudian di sesuaikan penilain tersebut sesuai predikat indeks SPBE. Untuk mengukur tingkat kematangan dalam mencapai tahapan evaluasi maka terdapat 4 domain yang yang harus dicapai yaitu domain kebijakan internal, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain layanan. Sejalan dengan melakukan evaluasi menggunakan tingkat kematangan maka penelitian ini melakukan evaluasi menggunakan teori Stufflebeam mengenai evaluasi kebijakan yang menyangkut dengan konteks, input, proses, produk. Agar lebih jelasnya maka digambarkan dalam kerangka fikir dibawah ini.



Gambar 2
Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menguji tingkat kematangan domain kebijakan internal, manajemen, tata Kelola, layanan SPBE dalam mengukur sejauh mana penerapannya *e-government* menggunakan teori stufflebean pada konteks, input, proses dan produk di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mengenai objek yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Di mana beberapa indikator yang ingin dicapai diantaranya ada empat domain dengan 47 sub indikator capaian di

uji dalam kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis yang dikaitkan dengan teori Stufflebean yaitu:

1. Kapabilitas Proses

a. Domain Kebijakan Internal SPBE memiliki aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE dengan memiliki 10 indikator capaian yang di uji dalam level tingkat kematangan.

- 1) Indikator pertama yaitu tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE yaitu pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- 2) Indikator kedua yaitu tingkat kematangan kebijakan internal peta rencanan SPBE yaitu merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 3) Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data yaitu menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- 4) Indikator keempat yaitu tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE yaitu merupakan pengaturan mengenai

Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

- 5) Indikator kelima yaitu tingkat kematangan kebijakan internal layanan pusat yaitu sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Indikator keenam yaitu tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra instansi pusat/daerah yaitu Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.
- 7) Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan instansi pemerintah pusat/daerah yaitu perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

- 8) Indikator kedepalan yaitu tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi yaitu mengatur terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
 - 9) Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan kebijakan internal audit TIK yaitu serangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
 - 10) Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE instansi pusat/daerah yaitu para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di instansi pusat/daerah.
- b. Domain tata Kelola SPBE memiliki aspek capaian yaitu perencanaan strategi SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE dengan memiliki 10 indikator capaian yang masing-masing di uji dalam level tingkat kematangan.
- 1) Indikator pertama yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE instansi pusat/daerah yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE.

- 2) Indikator kedua yaitu tingkat kematangan peta rencana SPBE instansi pusat/daerah yaitu dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- 3) Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE yaitu dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.
- 4) Indikator keempat yaitu tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE yaitu dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- 5) Indikator kelima yaitu tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE yaitu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- 6) Indikator keenam yaitu tingkat kematangan layanan pusat data yaitu fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (cloud).
- 7) Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/daerah yaitu jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

- 8) Indikator kedelapan yaitu tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/daerah yaitu perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
 - 9) Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan tim koordinasi SPBE instansi pusat/daerah yaitu para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
 - 10) Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE yaitu wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- c. Domain manajemen SPBE memiliki aspek penerapan manajemen SPBE dan audit TIK. Dengan memiliki 11 indikator capaian yang di uji dalam level tingkat kematangan.
- 1) Indikator pertama yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen resiko yaitu pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
 - 2) Indikator kedua yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi yaitu serangkaian proses yang meliputi penetapan

ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

- 3) Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen data yaitu serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- 4) Indikator keempat yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen asset TIK yaitu serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- 5) Indikator kelima yaitu tingkat kematangan kompetensi sumber daya manusia yaitu serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE.
- 6) Indikator keenam yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan yaitu proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- 7) Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan yaitu serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

8) Indikator kedelapan yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE yaitu serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

9) Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

10) Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan pelaksanaan audit aplikasi SPBE

11) Indikator kesebelas yaitu tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE.

2. Kapabilitas Fungsi Teknis

Domain Layanan SPBE yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses layanan dalam penerapan *e-government*. Titik fokusnya yaitu pada aspek administrasi pemerintah dengan indikator perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas dan kinerja. Dan pada aspek layanan public memiliki indikator berkaitan dengan pengaduan public, data terbuka, JDH, dan layanan publik unggulan. Dalam mengukur tingkat kematangan terdapat 16 indikator yang masing-masing memiliki tingkat level pencapaian dari level 1-5 yaitu:

- a. Indikator pertama yaitu tingkat kematangan layanan perencanaan yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Indikator kedua yaitu tingkat kematangan layanan penganggaran yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan layanan keuangan yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- d. Indikator keempat yaitu tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- e. Indikator kelima yaitu tingkat kematangan layanan kepegawaian yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- f. Indikator keenam yaitu tingkat kematangan layanan kearsipan yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- g. Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan layanan pengelolaan barang milik negara/daerah yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- h. Indikator kedelapan yaitu tingkat kematangan layanan pengawasan internal terkait pemerintah yaitu serangkaian proses untuk

menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- i. Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- j. Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan layanan kinerja pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- k. Indikator kesebelas yaitu tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- l. Indikator dua belas yaitu tingkat kematangan layanan data terbuka yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- m. Indikator tiga belas yaitu tingkat kematangan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- n. Indikator tingkat kematangan layanan publik sectoral 1 yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi

sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

- o. Indikator tingkat kematangan layanan publik sektoral 2 yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- p. Indikator tingkat kematangan layanan publik sektoral 3 yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada setiap indikator pada keempat domain maka dikategorikan berapa indeks SPBE dari setiap domain dari hasil akumulasi dari setiap indikator yang telah akumulasi pada setiap bobot penilaian.

- 3. Teori evaluasi menurut Stufflebean
 - a. Evaluasi Konteks yaitu melakukan identifikasi kebutuhan untuk memutuskan tujuan program.
 - b. Evaluasi input yaitu mengarahkan pada keputusan tentang strategi dan desain kebijakan dan program.
 - c. Evaluasi proses yaitu mengidentifikasi kekurangan dalam program saat implementasi.
 - d. Evaluasi produk yaitu mengukur hasil kebijakan dan program saat implementasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yaitu kurang lebih satu bulan yaitu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih tempat penelitian yang berlokasi di Pemerintahan kota Makassar dengan alasan tempat tersebut menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar.

C. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Ada pun Jenis penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian, maka tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan pelayanan publik. Maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan pengukuran objektif dan analisis matematis (statistik) terhadap sampel data yang diperoleh melalui data hasil evaluasi tingkat kematangan untuk membuktikan atau menguji hipotesis (dugaan sementara) yang diajukan dalam penelitian (Hardani et al., 2020).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan (Syahza, 2021).

Jadi penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata yang berdasarkan data empiris untuk mengetahui nilai atau keberadaan variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variable lain (Sugiyono, 2020).

D. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan Data sekunder yaitu menggunakan instrument evaluasi melalui website Diskominfo Kota Makassar dan studi pustaka mengenai evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan data dokumentasi hasil evaluasi tingkat kematangan yang dilakukan yaitu melakukan analisis beberapa dokumen dan studi pustaka yang berkaitan dengan penilaian tingkat kematangan berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan penjelasan bukti pendukung. Hal ini bermaksud untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan bahan penelitian (Usman, 2009).

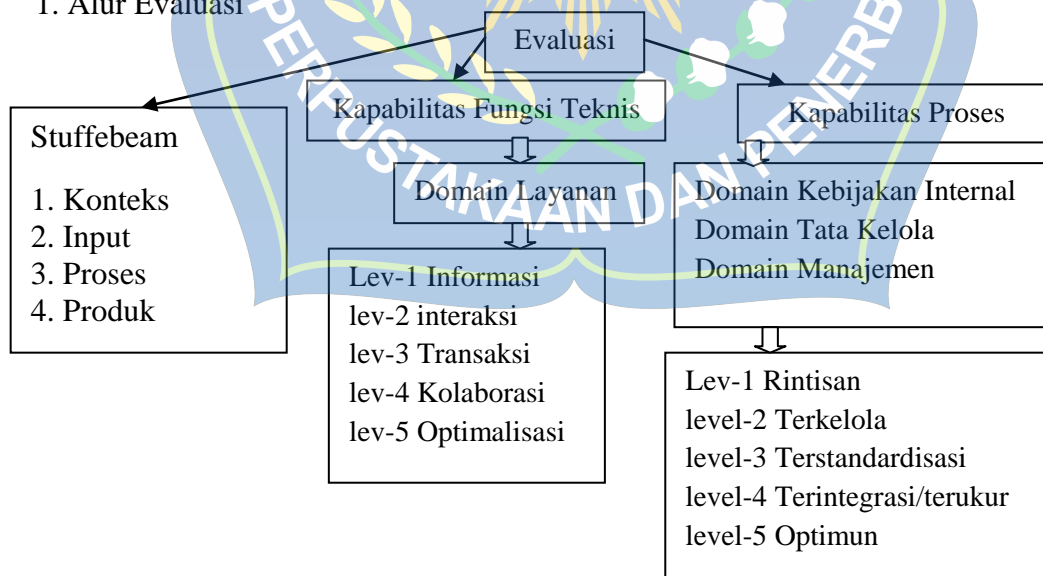
F. Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini teknik analisis data yang dikumpulkan dengan mereduksi data dokumentasi hasil pemantauan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian melakukan penyajian data yang telah dikumpulkan dengan model diagram/grafik dan teks, kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2020). Kemudian menggunakan alat analisis yaitu VOSviewer untuk menganalisis keterkaitan antara hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan studi pustaka untuk menganalisis suatu hasil penelitian berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik yang sejalan dengan penelitian kemudian menarik kesimpulan (Ida Samidah, 2019).

G. Desain Penelitian

Adapun alur penelitian ini dilihat pada gambar dibawah ini:

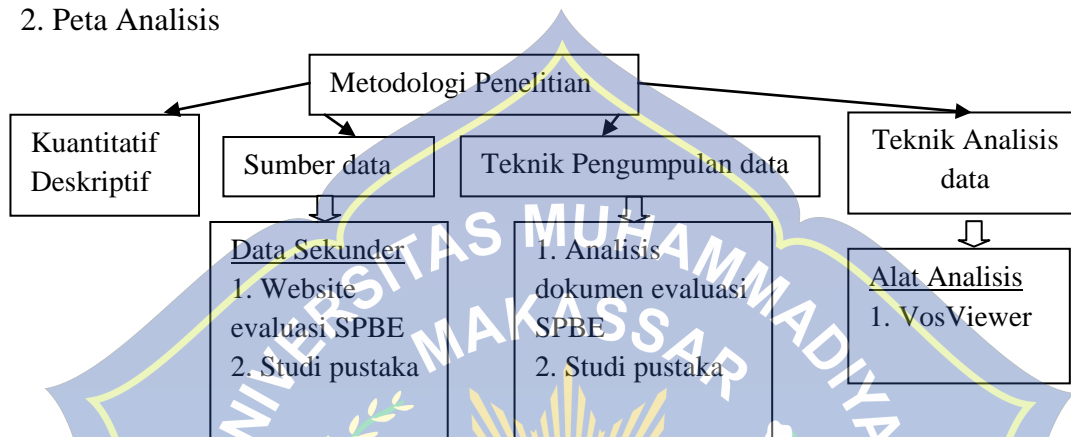
1. Alur Evaluasi



Gambar 3
Alur Evaluasi

Dalam mealakuan evaluasi SPBE menggunakan dua cara untuk menguji tingkat kematangan yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dengan memiliki tingkat capaian dari level 1-5.

2. Peta Analisis



Gambar 4
Peta Analisis

Pada metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menjabarkan data kuantitatif dengan menarasikan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa hasil uji kematangan melalui website diskominfo kota makassar studi pustaka. Kemudian Teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen evaluasi SPBE dan studi pustaka. Dan Teknik analisis data menggunakan alat analisis yaitu VosViewer untuk menguatkan data hasil uji kematangan dengan dokumen evaluasi SPBE dengan studi pustaka yang memiliki hubungannya hasil penelitian evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) berlokasi di jalan A. P. Pettarani no. 62 90000 makassar. Diskominfo menjadi salah satu SKPD dalam area pemerintahan kota makassar. Yang memiliki tugas membantu walikota Makassar melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi diskominfo yaitu melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan monitoring, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lainnya.

Adapun bidang layanan diskominfo berdasar pada peraturan walikota makassar no. 86 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjadinis komunikasi dan informatika kota makassar. Adapun bidang dalam pelayanan publik dari diskominfo yaitu bidang aplikasi, bidang humas dan IKP, bidang pengelolaan data elektronik dan bidang persandian.

B. Hasil penelitian

Dalam melakukan evaluasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan menggunakan teori Stufflebeam dengan konteks, input, proses dan produk, pada uji kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis

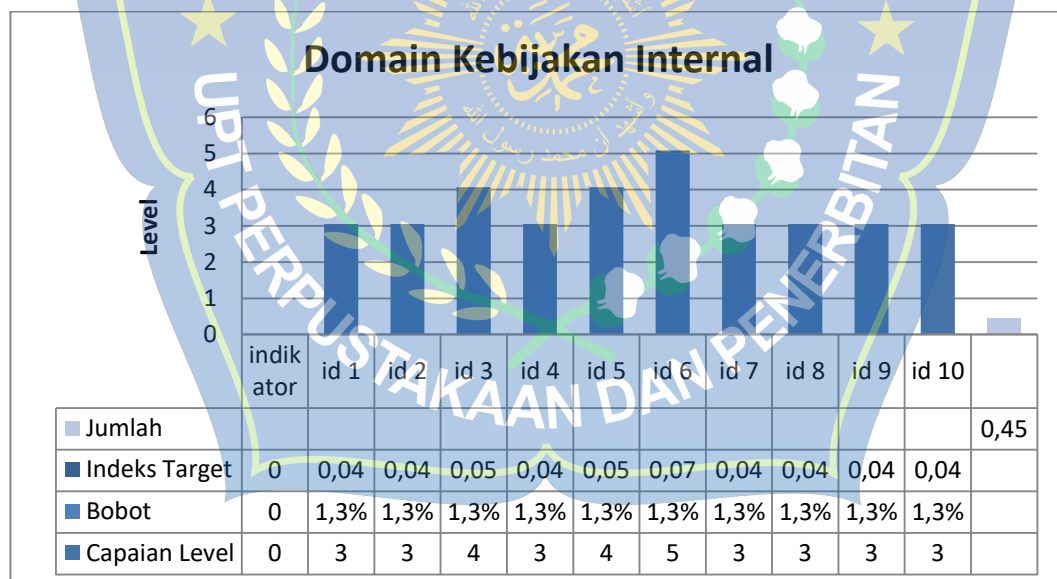
dengan menguji tingkat kematangan pada domain kebijakan internal, domain tata Kelola, domain manajemen, dan domain layanan.

1. Kapabilitas proses

Pada uji kematangan kapabilitas proses terdapat 3 domain capaian uji kematangan yaitu domain kebijakan internal, domain tata Kelola, domain manajemen.

a. Domain kebijakan internal SPBE

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap indikator pada kebijakan internal tata Kelola SPBE dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5
Hasil uji level tingkat kematangan domain kebijakan internal

Gambar 2. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal tata Kelola mendapatkan nilai indeks 0.45. Dimana hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian level x bobot 1,3%

menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target masing-masing indikator diakumulasikan menghasilkan nilai indeks. Dari penilaian tingkat kematangan pada tahun 2022 secara keseluruhan pada 10 indikator mencapai level 3 (Murwati, 2022).

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada tahun ini mengalami peningkatan dilihat pada indikator 3 dan 5 yang mengalami peningkatan level tingkat kematangan sampai level 4 dengan indeks target 0,05, dan indikator 6 mengalami peningkatan level tingkat kematangan sampai level 5 dengan indeks target 0,07.

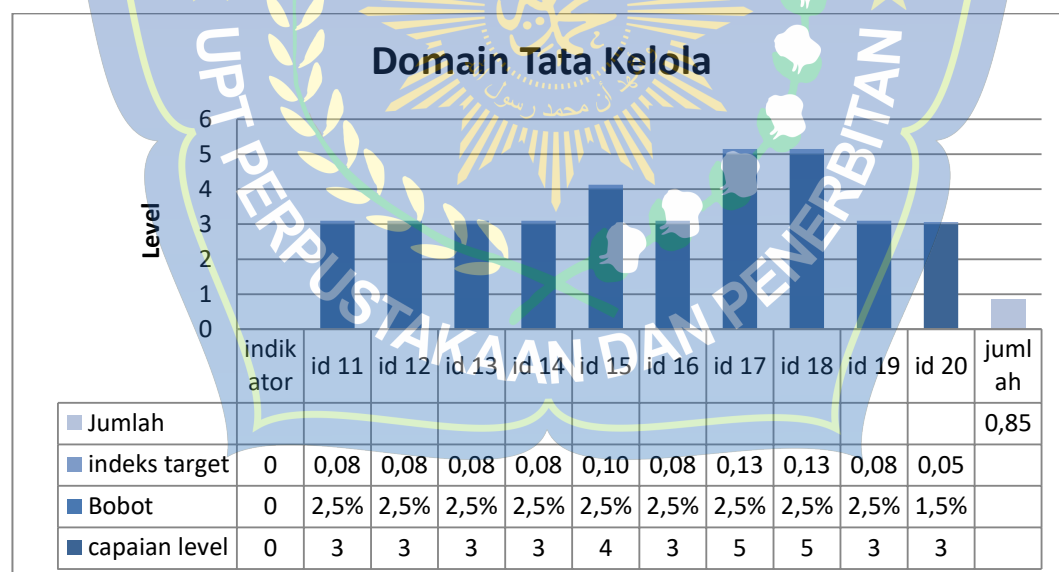
Pada uji level tingkat kematangan indikator 1,2,4,7,8,9,10 mencapai level 3 dengan indeks target 0.04 artinya kebijakan internal tata kelola telah terstandarisasi dengan pengaturan yang telah ada ketetapannya yang memenuhi semua kebutuhan dalam proses penerapan SPBE. sedangkan indikator 3 dan 5 mencapai level 4 artinya telah adanya integrasi dan terukur pada pengaturan yang telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja. Serta indikator 6 mencapai level 5 artinya telah optimum dengan pengaturan yang telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap suatu perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilakukan dengan peningkatan kualitas. Hal tersebut menjadi kekuatan penerapan aspek kebijakan internal terkait tata kelola dengan adanya 2 indikator yang telah mencapai level 4 kemudian terdapat 1 indikator mencapai level 5. Sedangkan kelemahannya selain indikator 3, 5 dan 6 perlu ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya mampu

mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal.

Dengan demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE perlu meningkatkan level capaian pada setiap indikator. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola SPBE pada setiap indikator telah mengalami peningkatan tingkat level kematangan namun beberapa indikator perlu untuk ditingkatkan agar terlaksananya proses penerapan yang baik.

b. Domain tata Kelola SPBE

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap indikator pada domain tata Kelola dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6
Hasil uji level tingkat kematangan domain tata kelola

Gambar 3. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain tata Kelola pada aspek perencanaan strategi, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan

penyelenggara SPBE mendapatkan nilai indeks 0.85. Pada capaian uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada 10 indikator domain tata kelola pada aspek perencanaan strategis, Aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek penyelenggaraan SPBE mencapai nilai indeks 0,85. Dimana hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian level x bobot 2,5 % menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target masing-masing indikator diakumulasikan menghasilkan nilai indeks.

Dari penilaian tingkat kematangan tahun 2022 secara keseluruhan pada 10 indikator terdapat 4 indikator yaitu indikator 17-20 mencapai level 3. Indikator 11-15 mencapai level 1 (dibawah target minimal level 2), dan terdapat satu indikator memenuhi target yaitu indikator 16 mencapai level 2 (Murwati, 2022).

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada tahun ini mengalami peningkatan dilihat pada indikator 11-14 memenuhi target level dengan mencapai level 3 dengan indeks target 0,08 dan indikator 15 mencapai level 4 dengan indeks target 0,10. dan indikator 16,19-20 mencapai level 3 dengan indeks target 0,08 dan indikator 17-18 mencapai level 5 dengan indeks target 0,13

Pada uji level tingkat kematangan indikator 11-14 mencapai level 3 artinya perencanaan strategi SPBE telah terstandardisasi dengan pengaturan telah ditetapkan yang memenuhi semua kebutuhan dalam proses penerapan SPBE seperti dokumen arsitektur SPBE, peta rencana, rencana dan anggaran dan inovasi proses bisnis. sedangkan indikator 15 mencapai level 4 artinya aspek teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE telah adanya integrasi dan terukur pada pengaturan telah ditetapkan dengan

memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. Hal tersebut dilihat dengan adanya integrasi pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan dengan kepala dinas kominfo dengan pembangunan aplikasi yang direvie dan dievaluasi secara periodik.

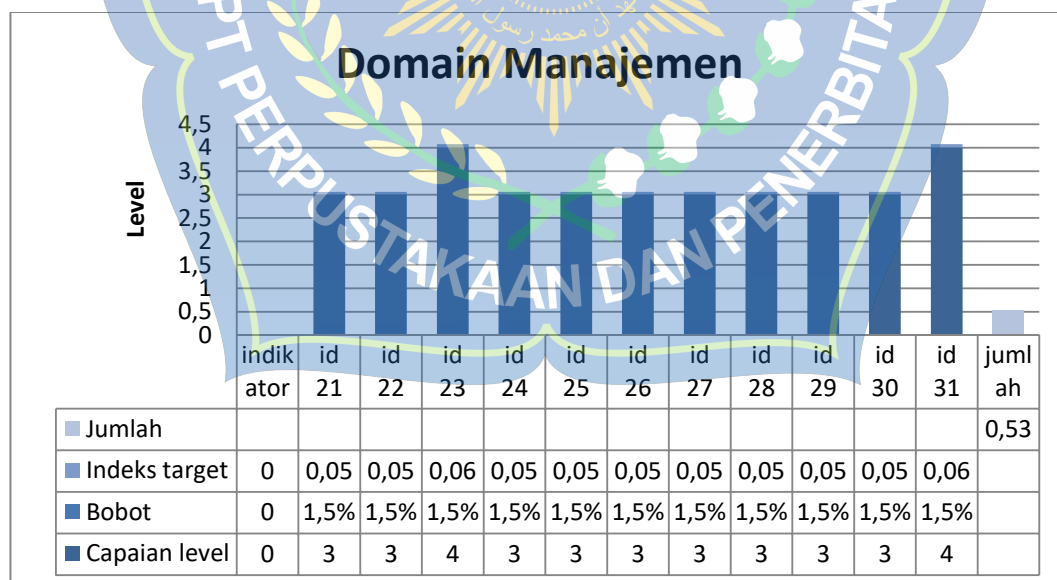
Serta indikator 16, 19-20 mencapai level 3 artinya aspek teknologi informasi dan komunikasi, dan aspek penyelenggara SPBE telah terstandardisasi dengan pengaturan telah ditetapkan yang memenuhi semua kebutuhan dalam proses penerapan SPBE seperti layanan pusat data telah digunakan oleh seluruh unit kerja perangkat daerah dan telah ada tim koordinasi SPBE. Dan indikator 17-18 mencapai level 5 artinya telah optimum dengan pengaturan yang telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap suatu perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilakukan dengan peningkatan kualitas seperti hasil reuiu dan evaluasi layanan jaringan antar instansi dan sistem pengubung layanan instansi telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Hal tersebut menjadi kekuatan penerapan aspek kebijakan internal terkait tata kelola dengan adanya 2 indikator yang telah mencapai level 5 dan 1 indikator mencapai level 4. Sedangkan kelemahannya selain indikator 15,17-18 perlu ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya mampu mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain tata

kelola pada aspek perencanaan strategis, TIK, dan aspek penyelenggaraan SPBE perlu ditingkatkan level capaian pada setiap indikator.

c. Domain manajemen SPBE

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap indikator pada domain manajemen dilihat pada gambar Gambar 4. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain manajemen pada aspek penerapan manajemen dan audit TIK mendapatkan nilai indeks 0,53. Pada capaian uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada 11 indikator domain manajemen SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK SPBE mencapai nilai indeks 0,53. Dimana hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian level x bobot 1,5 % menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target masing-masing indikator diakumulasikan menghasilkan nilai indeks.



Gambar 7
Hasil uji level tingkat kematangan domain manajemen

Dari penilaian tingkat kematangan tahun 2022 secara keseluruhan pada 11 indikator terdapat 2 indikator saja yang memenuhi target yaitu indikator 24-25 mencapai level 2 dan selebihnya indikator hana mencapai level 1 (Murwati, 2022).

Setelah dilakukan uji kematangan pada hasil uji tingkat kematangan pada tahun ini mengalami peningkatan dilihat pada indikator 21-22 dan 24-30 memenuhi target level dengan mencapai level 3 dengan indeks target 0,05 dan indikator 23 dan 31 mencapai level 4 dengan indeks target 0,6.

Pada uji level tingkat kematangan indikator 21-22 mencapai level 3 artinya penerapan manajemen risiko telah terpenuhi dan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko yang terstandardisasi dan manajemen keamanan informasi SPBE telah terstandardisasi dengan pengaturan telah ditetapkan yang memenuhi semua kebutuhan dalam proses penerapan SPBE. sedangkan indikator 24-30 mencapai level 3 artinya penerapan manajemen aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh perangkat daerah, penerapan manajemen sumber daya manusia, penerapan manajemen pengetahuan, perubahan, manajemen layanan, audit infrastruktur, dan audit aplikasi SPBE yang telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di instansi pemerintah daerah.

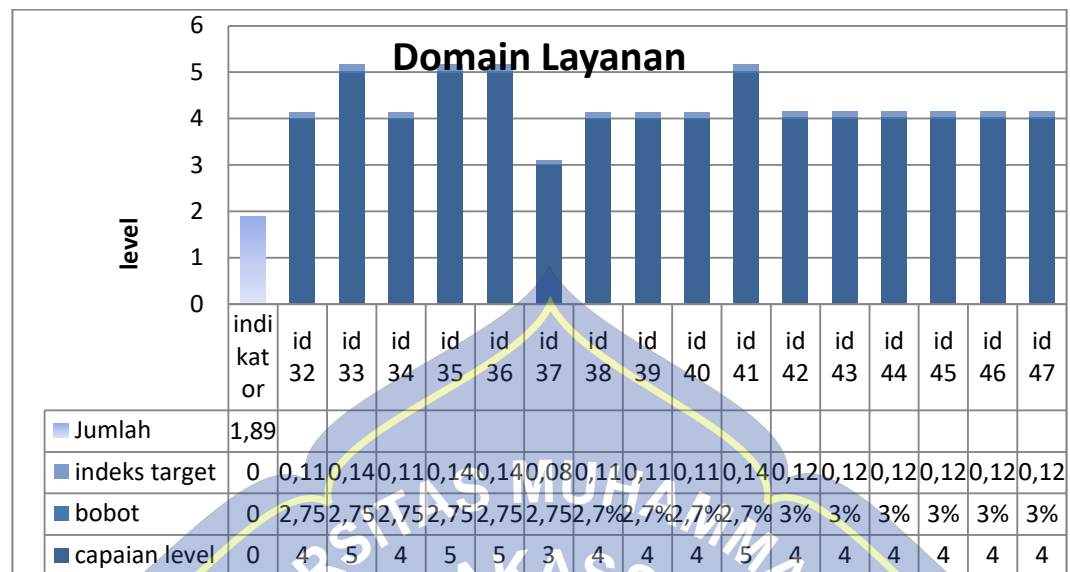
Dan indikator 23 dan 31 mencapai level 4 artinya penerapan manajemen data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan forum satu data atau tim koordinasi SPBE instansi pemerintah daerah yang diterapkan diseluruh perangkat kerja dan tingkat kematangan audit dilaksanakan oleh auditor

TIK/sistem keamanan informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/sistem keamanan informasi telah adanya integrasi dan terukur pada pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja.

Hal tersebut menjadi kekuatan manajemen SPBE pada aspek penerapan manajemen dan audit TIK adanya 2 indikator yang telah mencapai level 4 dan selebihnya hanya mencapai level 3. Sedangkan kelemahannya selain indikator 23-31 perlu ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya mampu mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain manajemen SPBE pada aspek manajemen SPBE dan audit TIK perlu ditingkatkan level capaian pada setiap indikator.

2. Pada uji kematangan kapabilitas fungsi teknis terdapat satu domain capaian uji kematangan yaitu domain layanan SPBE.
 - a. Domain layanan SPBE

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap indikator pada domain manajemen dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 8
Hasil uji level tingkat kematangan domain manajemen

Gambar 5. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain manajemen pada aspek penerapan manajemen dan audit TIK mendapatkan nilai indeks 1,89. Pada capaian uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada 16 indikator domain layanan SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik SPBE dan aspek layanan publik berbasis elektronik SPBE mencapai nilai indeks 1,89. Dimana hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian level x bobot 2,75% dan 3% menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target masing-masing indikator diakumulasikan menghasilkan nilai indeks.

Dari penilaian tingkat kematangan tahun 2022 secara keseluruhan pada 16 indikator terdapat 4 indikator yang mencapai level 4 yaitu indikator 32-35 dan selebihnya indikator 37-38 dan 40-47 mencapai level 3. Dan terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator 36 dan 39 mencapai level 2 dan level 1 (Murwati, 2022).

Setelah dilakukan uji kematangan pada hasil uji tingkat kematangan pada tahun ini mengalami peningkatan dilihat pada indikator 32-35 terdapat peningkatan level pada indikator 33 dan 35 dengan mengalami peningkatan level 5, sedangkan indikator 32 dan 34 tetap berada di level 4. dan indikator 37-38 hanya level 38 yang mengalami peningkatan ke level 4 dengan indeks target 0,11, serta indikator 37 hanya menetap di level 3 dengan indeks target 0,08.

Indikator 39-47 terdapat 1 indikator yang mencapai level 5 yaitu indikator 41 dengan indeks target 0,14. Indikator 39-40 dan 42-47 telah mengalami peningkatan level dari level 3 ke level 4 dengan indeks target 0,11 dan 0,12. Indikator 36 dan 41 mengalami peningkatan level ke level 5 dengan indeks target 0,14.

Pada uji level tingkat kematangan indikator 32-35, dimana indikator 33 dan 35-36 mencapai level 5 artinya layanan penganggaran, layanan kepegawaian dan layanan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan perbaikan dengan optimalisasi layanan SPBE yang dapat beradaptasi berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi untuk meningkatkan tata kelola agar dilaksanakan dengan peningkatan kualitas pelayanan berbasis elektronik. Dan indikator 32 dan 34 mencapai level 4 artinya layanan perencanaan dan layanan keuangan telah dilakukan perbaikan dengan kolaborasi antar instansi yang menerapkan layanan SPBE.

Indikator 37 dan 38 mencapai level 3 dan level 4 artinya layanan kearsipan yang dinamis berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna

terkait kearsipan dinamis seperti otomatisasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data dan layanan pengelolaan barang milik negara berbasis elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan lain.

Indikator 39-40 dan 42-47 mencapai level 4 artinya layanan pengawasan internal terkait pemerintah dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), layanan public sektoral 1,2,3 memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya yang telah terpenuhi. Dan indikator 41 mencapai level 5 artinya layanan kinerja pegawai berbasis elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan yang secara fungsi teknis mencapai optimalisasi.

Hal tersebut menjadi kekuatan layanan SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dimana adanya 4 indikator yang telah mencapai level 5 dan selebihnya hanya mencapai level 4. Sedangkan kelemahannya terdapat 1 indikator yang tidak mengalami peningkatan level yaitu indikator 37 hanya berada di level 3 sehingga perlu ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya mampu mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain layanan SPBE pada aspek administrasi

pemerintah dan layanan publik perlu ditingkatkan terutama pada indikator yang tidak menunjukkan peningkatan level capaian.

Tabel 4
Indeks SPBE Domain dan aspek

No	Nama Indeks	Nilai Indeks	Jumlah
1	Domain Kebijakan SPBE	0,45	0,45
	Aspek Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	0,45	
2	Domain Tata Kelola SPBE		0,85
	Aspek Perencanaan Strategi SPBE	0,30	
	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,43	
	Aspek Penyelenggara SPBE	0,12	
3	Domain Manajemen SPBE		0,53
	Aspek Penerapan Manajemen SPBE	0,38	
	Aspek Audit TIK	0,15	
4	Domain Layanan SPBE		1,89
	Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,17	
	Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	0,72	
			3,71*Sangat Baik

Sumber: Uji Tingkat Kematangan 2023

Tabel 4, Setelah dilakukan uji-tingkat kematangan level 1-5 pada 4 domain SPBE dengan indikator sebanyak 47 indikator maka diakumulasikan domain kebijakan internal mencapai nilai indeks 0,45, domain tata kelola SPBE mencapai nilai indeks 0,85, domain manajemen SPBE mencapai nilai indeks 0,53 dan domain layanan SPBE mencapai nilai indeks 1,89. Setelah didapatkan nilai indeks dari keempat domain maka diakumulasikan menjadi $0,45+0,85+0,53+1,89= 3,71$. Mengacu pada metode pemantauan dan evaluasi SPBE dengan merujuk pada standardisasi untuk menentukan tingkat penerapan

SPBE yang berlokasi di Diskominfo kota Makassar dengan mencakup 73 SKPD di pemerintah kota Makassar dengan ini mencapai nilai indeks 3,71.

Pada penilaian SPBE tahun 2022 yang hanya mencapai nilai indeks 2,45 dengan predikat “Cukup” dan evaluasi SPBE provinsi Sulawesi selatan mencapai nilai indeks 2,12 dengan predikat “Cukup”. Sehingga penilaian untuk menguji tingkat kematangan SPBE di Diskominfo Kota Makassar memperoleh nilai indeks 3,71 dengan predikat “Sangat Baik” hal tersebut membuktikan bahwa telah adanya peningkatan pada setiap indikator dalam mencapai level kematangan untuk setiap domain SPBE.

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan dengan keempat domain pada kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dengan 47 sub indikator maka temuan tersebut dilakukan analisis evaluasi menggunakan teori Stufflebeam.

1. Evaluasi konteks

Pada penerapan SPBE terdapat arah dan tujuan yang terkandung dalam peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. 59 tahun 2020 tentang pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pedoman Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia no. 6 tahun 2023 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan pemerintahan berbasis elektronik yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta adanya pelayanan public yang

berkualitas dan terpercaya dan pelayanan SPBE yang terpadu. Hal tersebut sejalan dengan visi misi SPBE.

2. Evaluasi Input

Pada evaluasi input yaitu mengarah pada suatu keputusan tentang strategi dan desain kebijakan dalam program. Sehingga pada proses penerapan SPBE terdapat 4 (empat) domain yang digunakan untuk mengetahui penerapan SPBE yaitu domain kebijakan internal, domain kebijakan tata Kelola, domain manajemen dan domain layanan. Pada input penerapan SPBE domain kebijakan menjadi suatu strategi utama dan desain kebijakan dalam melaksanakan program yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kebijakan internal pada aspek kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE terdapat beberapa capaian sub indikator. Pada sub indikator kebijakan internal terkait arsitektur SPBE adalah hal yang berkaitan dengan kebijakan yang mengatur integrasi SPBE baik itu instansi pusat/daerah. Pada tingkat kematangan kebijakan peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, jaringan intra instansi, penggunaan sistem penghubung layanan instansi, manajemen keamanan informasi, audit Tik dan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam strategi dan desain kebijakan yang termasuk dalam input evaluasi SPBE telah adanya kebijakan dan strategi yang termuat dalam domain kebijakan internal pada 10 sub indikator dengan capaian level yang telah meningkat.

3. Evaluasi Proses

Pada penerapan SPBE dengan menguji tingkat kematangan terdapat kekurangan dan kelebihan. Hal tersebut dilihat pada domain kebijakan internal terdapat 3 sub indikator yang mengalami peningkatan level diantaranya pada level kematangan kebijakan internal terkait manajemen data dengan mencapai level 4 dari semula level 3, yang artinya terukur dan terstandardisasi dan sub indikator tingkat kematangan kebijakan terkait layanan pusat data telah mencapai level 4 dari semula yang hanya mencapai level 3. Dan sub indikator kebijakan internal terkait pengoperasian jaringan intra instansi dari semula level 3 meningkat menjadi level 5 dengan optimum dengan bukti dukung adanya dokumen mengenai kebijakan yang terkait layanan jaringan intra instansi yang telah ditindaklanjuti. Kekurangannya pada domain kebijakan internal yaitu pada 10 sub indikator hanya terdapat 3 indikator yang meningkat level tingkat kematangannya. Hal tersebut menjadi rekomendasi bagi instansi terkait untuk meningkatkan capaian level agar penerapan SPBE bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pada domain tata Kelola terdapat 10 sub indikator yang diuji pada tingkat kematangan. Terdapat hanya ada 2 sub indikator yang tidak mengalami peningkatan level yaitu sub indikator tingkat kematangan tim koordinasi SPBE instansi dan tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE yang hanya menetap di level 3. Sedangkan sub indikator arsitektur SPBE, peta rencana, rencana anggaran SPBE, inovasi proses bisnis, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, jaringan intra instansi dan sistem penghubung

layanan instansi telah meningkat level kematangan dari level sebelumnya yang dimana sub indikator 17 layanan jaringan intra instansi dan sub indikator 18 sistem penghubung layanan instansi mencapai level tertinggi dengan mencapai level 5 yaitu optimum. Dari hasil evaluasi pada domain tata Kelola hanya dua sub indikator yang menjadi kekurangannya dengan tidak mengalami peningkatan level. Sedangkan kelebihan selain indikaotr 19 dan 20 telah menunjukkan peningkatan level yang baik dari tingkat level sebelumnya meningkat setingkat lebih tinggi dan terdapat dua indikator yang mengalami peningkatan yang signifikan dengan mencapai level tertinggi yaitu level 5 optimum.

Pada domain manajemen terdapat 11 sub indikator yang menjadi capaiannya. Dimana secara keseluruhan indikator mengalami peningkatan dari semula hanya mencapai level 1, setelah dilakukan evaluasi uji tingkat level kematangan mencapai peningkatan 2 kali lipat dengan masing-masing mencapai level 3 dan yang tertinggi pada level 4. Kelebihan dari domain ini sangat menunjukkan adanya positif yang mendukung penerapan SPBE yang lebih baik lagi.

Pada domain layanan terdapat 16 sub indikator yang diuji pada level tingkat kematangan. Ditemukan terdapat hanya satu indikator yang tidak mengalami peningkatan yaitu indikator 37 pada tingkat kematangan layanan kearsipan yang hanya berada di level 3. Sedangkan sub indikator lainnya mengalami peningkatan level setingkat lebih tinggi, namun terdapat 4 indikator yang mencapai level 5 yaitu tingkat kematangan layanan

penganggaran, tingkat pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, dan layanan kinerja pegawai.

Dari hasil temuan pada ke empat domain dengan melihat kekurangan dan kelebihan mengenai peningkatan level kematangan. Dimana pada domain kebijakan terdapat 8 indikator yang tidak mengalami peningkatan level. domain tata Kelola terdapat 2 indikator yang tidak mengalami peningkatan level dari 10 indikator. Domain manajemen secara keseluruhan mengalami peningkatan dan tidak terdapat sub indikator yang tidak meningkat. Dan domain layanan terdapat hanya satu indikator yang tidak mengalami peningkatan level dari 16 sub indikator. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa domain kebijakan perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan bagaimana kebijakan sebagai pondasi penerapan SPBE bisa lebih terarah. Dan sub indikator pada domain tata Kelola dan layanan telah menunjukkan peningkatan level walaupun masih terdapat sub indikator yang belum meningkat.

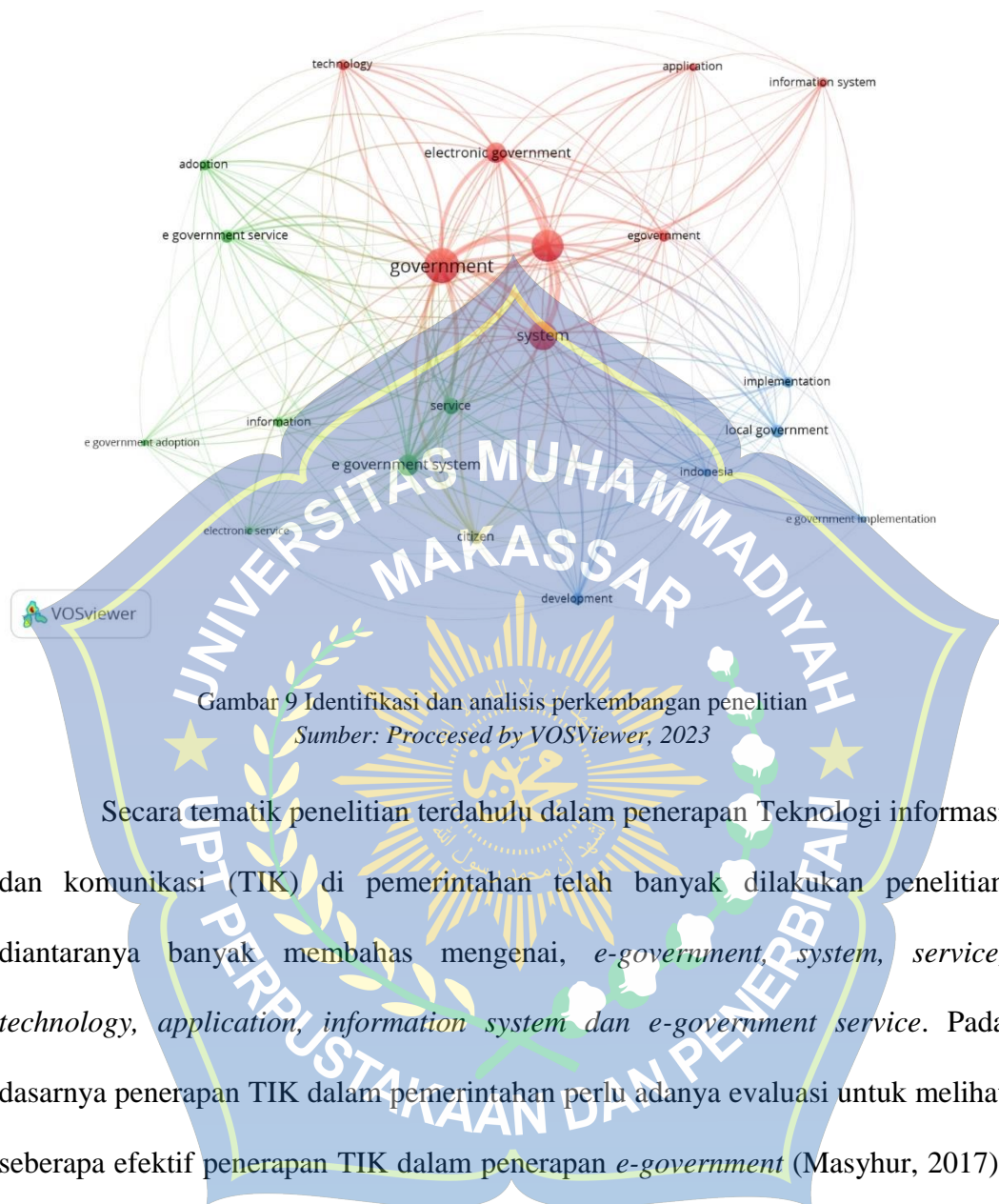
3. Evaluasi Produk

Pada evaluasi produk dimana diukur pada hasil kebijakan dan program untuk mengenai kelanjutan atau fokus Kembali pada program. Hal tersebut pada penerapan SPBE dengan menguji tingkat level kematangan dimana domain kebijakan internal mencapai nilai indeks target 0,45, domain tata Kelola mencapai nilai indeks target 0,85 domain manajemen mencapai nilai indeks target 0,53, dan domain layanan mencapai nilai indeks 1,89. Sehingga setelah diakumulasikan indeks capaian dari ke4 domain tersebut menghasilkan

nilai indeks 3, 71 dengan predikat “Sangat Baik” hal tersebut membuktikan bahwa hasil pengukuran terhadap penerapan SPBE telah menunjukkan peningkatan yang baik dari sebelumnya pada evaluasi SPBE hanya mencapai nilai indeks 2, 45 dengan predikat “cukup”. Sehingga dapat disimpulkan keberhasilan dari perbaikan terhadap penerapan SPBE di Diskominfo dalam lingkup pemerintahan kota makassar telah berhasil melaksanakan perbaikan dengan meningkatnya indeks SPBE kota makassar.

C. Pembahasan

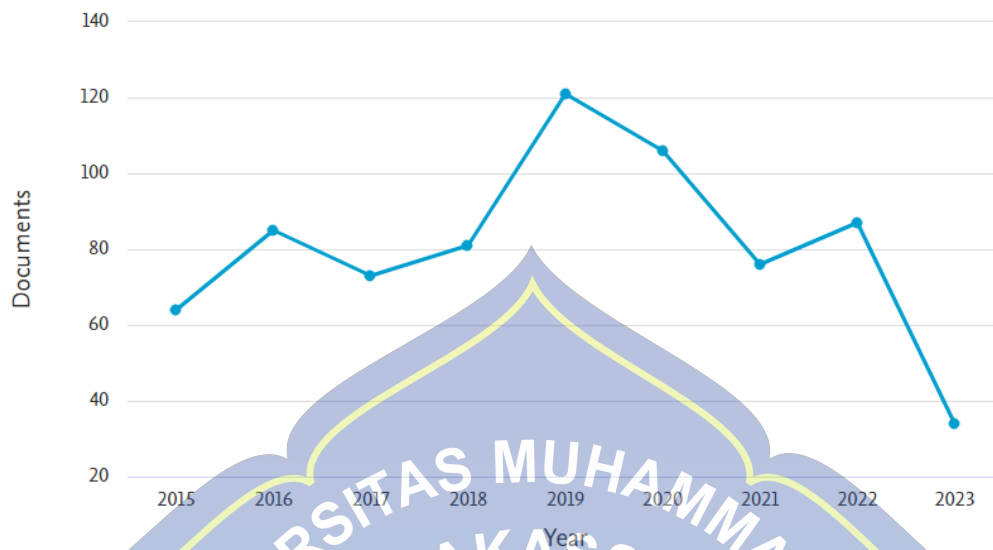
Pada hasil uji tingkat kematangan menggunakan uji kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dengan menggunakan alat analisis yaitu VosViewer untuk memetakan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menguatkan temuan yang berkaitan pada evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menguji tingkat kematangan pada keempat domain, hal tersebut digambarkan dibawah ini yaitu:



Gambar 9 Identifikasi dan analisis perkembangan penelitian

Sumber: Proccesed by VOSViewer, 2023

Secara tematik penelitian terdahulu dalam penerapan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan telah banyak dilakukan penelitian diantaranya banyak membahas mengenai, *e-government*, *system*, *service*, *technology*, *application*, *information system* dan *e-government service*. Pada dasarnya penerapan TIK dalam pemerintahan perlu adanya evaluasi untuk melihat seberapa efektif penerapan TIK dalam penerapan *e-government* (Masyhur, 2017). Sehingga temuan pada evaluasi tingkat kematangan SPBE di Diskominfo Kota Makassar ditemukan nilai indeks SPBE pada tahun 2022 mencapai nilai indeks 2,45 dengan predikat “Cukup”. Sehingga dilakukan evaluasi Kembali pada tahun 2023 mencapai nilai indeks 3,71 dengan predikat “Sangat Baik”. Hal tersebut menjadi capaian yang signifikan terjadi pada peningkatan capaian indeks yang sangat baik.

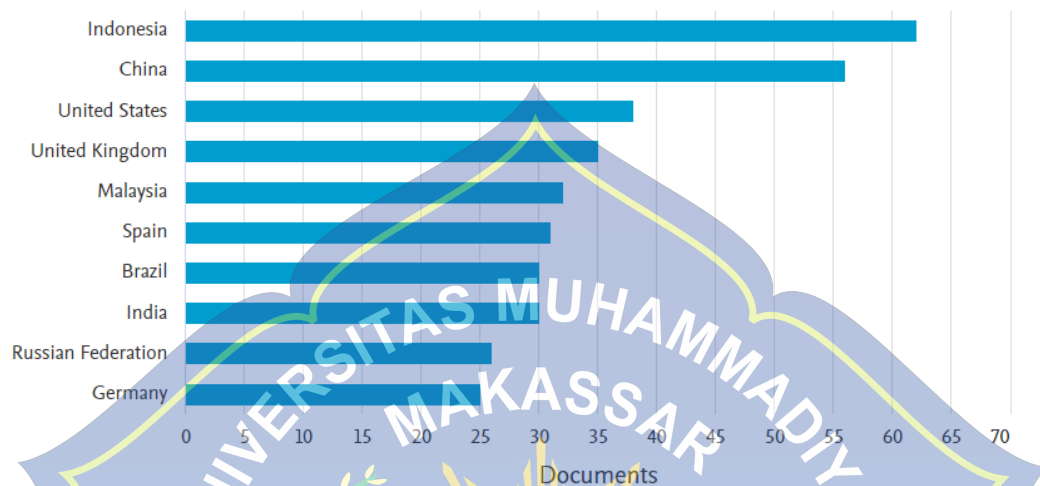


Gambar 10
Identifikasi dokumen pertahun

Perkembangan dokumen pada hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan *e-government* dan evaluasi mengalami naik turun setiap tahunnya. Hasil citasi dokumen diambil dari tahun 2015-2023 sebanyak 728 dokumen dari analisis data tren publikasi melalui Citasi Scopus. Ditemukan pada tahun 2015 sebanyak 64 dokumen, pada tahun 2016 sebanyak 85 dokumen, tahun 2017 sebanyak 73 dokumen, Pada tahun 2018 sebanyak 81 dokumen, tahun 2019 sebanyak 121 dokumen, tahun 2020 sebanyak 106 dokumen, tahun 2021 sebanyak 76 dokument, tahun 2022 sebanyak 87 dokumen dan tahun 2023 sebanyak 34 dokumen.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian mengenai *e-government* ditemukan pada tahun 2019 yang paling banyak penelitian yang mengangkat topik *e-government* dan evaluasi. Sedangkan dokumen yang mengalami penurunan signifikan berada ditahun 2023, sedangkan rentang tahun

2015, 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2021 hanya mengalami naik turun tren publikasi.



Gambar 10
Identifikasi dokumen menurut negara

Setelah dilakukan analisis jumlah dokumen yang mengalami proses distribusi publikasi setiap tahunnya. Sehingga pada gambar ini memberikan gambaran mengenai dokumen publikasi secara global dimana Indonesia memuncaki tren publikasi dengan jumlah dokumen sebanyak 62 dokumen, diikuti China 56 dokumen, United States 38 dokumen, United Kingdom 35 dokumen, Malaysia 31 dokumen, Spain 31 dokumen, Brazil 30 dokumen, India 30 dokumen, Russian federation 26 dokumen, Germany 25 dokumen.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan *e-government* di Indonesia sangat signifikan menunjukkan penerapan SPBE begitu penting. Mengingat setiap tahunnya seluruh instansi pusat maupun daerah melakukan evaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE untuk melihat sejauh mana indeks SPBE capaian yang tentunya orientasinya untuk mencapai indeks

SPBE Nasional yang meningkat. Pada hasil evaluasi SPBE indeks nasional tahun 2021 secara keseluruhan memperoleh nilai indeks 2,24 dengan predikat “Cukup” (Widyantini, 2021). hal itu dibuktikan dengan dengan melaukan evaluasi terhadap 517 kementrian, Lembaga, dan pemerintah daerah, terdiri atas 92 kementrian/Lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga dengan perolehan domain kebijakan internal mencapai nilai indeks 2,39, domain tata Kelola mencapai nilai indeks 1,85, domain manajemen mencapai nilai indeks 1,32, dan domain layanan SPBE mencapai nilai indeks 2,97. Sehingga hasil akumulasi indeks nasional mencapai 2,24 dengan predikat “Cukup”.

Documents by type



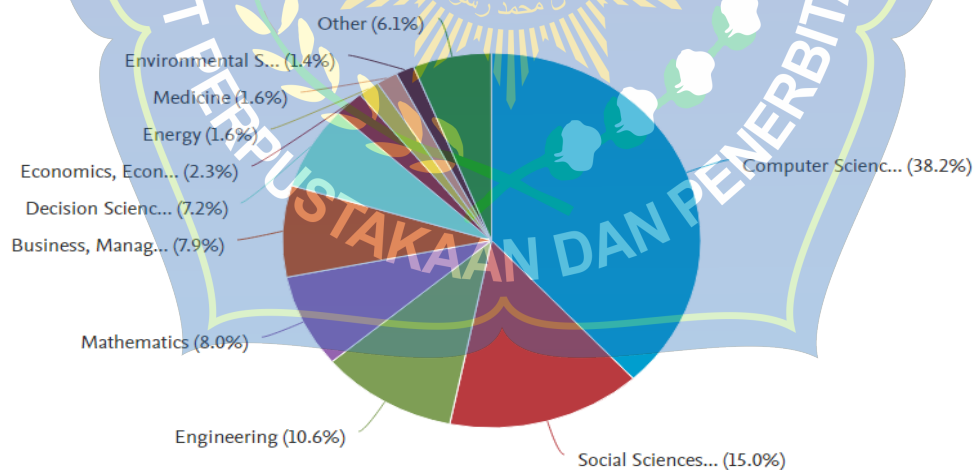
Gambar 11
Identifikasi sumber penelitian

Setelah melakukan analisis terhadap hubungan antara tren publikasi setiap tahunnya dengan negara yang mengalami proses tren publikasi maka pada bagian ini menggambarkan sumber penelitian yang mengangkat topik evaluasi

dan *e-government*. dimana sumber penelitian tersebut berasal dari Conference paper sebanyak 339 dokumen, artikel sebanyak 288 dokumen, conference review 52 dokumen, book chapter 38, review sebanyak 6 dokumen dan book 5 dokumen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber penelitian pada topik evaluasi dan *e-government* menunjukkan tren positif yang berkaitan dengan topik penelitian hal tersebut dilihat dengan tingginya penelitian mengenai conference paper yang memiliki referensi terbanyak yang menjadikan rujukan bagi peneliti untuk melakukan analisis dan pengamatan. Kemudian dilanjutkan dengan dokumen artikel yang cukup tinggi sehingga rujukan perbaikan terhadap uji kematangan mengenai penerapan SPBE menjadi penting untuk menguatkan temuan pada penelitian yang dilakukan.

Documents by subject area



Gambar 12
Identifikasi Sumber Keilmuan

Setelah melakukan analisis terhadap sumber penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan *e-government*. maka pada bagian ini memberikan gambaran

sumber keilmuan yang membahas topik penelitian, yang dimana menemukan keilmuan computer science lebih banyak mengangkat topik evaluasi dan *e-government* dengan memperoleh 535 dokumen, yang diikuti social science 210 dokumen, engineering 148 dokumen, mathematics 112 dokumen, business, manajemen and akuntansi 110 dokumen, decision sciences 100 dokumen, economics, econometrics and finance 32 dokumen, energy 23 dokumen, medicine 23 dokumen, dan environmental science 20 dokumen.

Dapat disimpulkan bahwa topik yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lebih banyak dikaji dalam keilmuan computer science mengingat secara elektronik memiliki peran penting dalam pemanfaatan TI dalam *e-government*. namun pada kajian keilmuan dari penelitian ini juga berada pada posisi kedua dengan perolehan dokumen yang signifikan positif. Karna implementasi dari TI kedalam pemerintahan sangat erat kaitannya sehingga sangat penting bagaimana tren publikasi yang mengangkat topik evaluasi dan *e-government* sangat berperan penting sebagai rujukan dan referensi untuk menguatkan temuan dengan menganalisis citasi dokumen terhadap penelitian yang dilakukan.

Tabel 5
Identifikasi penelitian di Diskominfo Kota Makassar

Kapabilitas Proses	Jumlah Dokumen	Nama Penulis	Judul	Sub Indikator Capaian
Domain Kebijakan Interna	2	Aries, 2018	Manajemen perkotaan berbasis e-government	Kebijakan arsitektur SPBE, peta rencana
		wahyuni, 2021	strategi implementasi smart governance	peta rencana SPBE
Domain Tata Kelola	4	Thamrin, 2019	Aplikasi Sitem informasi Geografis	Aplikasi SPBE
		Yumanizar, 2020	Analisis Karakteristik Penggunaan Media sosial	Aplikasi SPBE
		Khaidir, 2022	Etika Komunikasi Publik dalam ruang media sosial	Aplikasi SPBE
		Aulia, 2020	Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai alat komunikasi menyampaikan	Aplikasi SPBE
Domain Manajemen	2	arif, 2016	aktifitas human relations pada diskominfo dalam meningkatkan harmonisasi	sistem penghubung layanan
		Hasanuddin, 2019	Strategi keamanan informasi kota cerdas	Manajemen Keamanan Informasi
Kapabilitas fungsi teknis		Surullah, 2023	Transfaranasi informasi dan komunikasi publik dalam media sosial	manajemen pengetahuan aplikasi SPBE
domain layanan	8	Pratiwi, 2023	responsivitas pemerintah melalui elektronik government	layanan SPBE
		siswanto, 2020	analisis kinerja pegawai pada diskominfo	layanan kinerja pegawai
		hafid, 2015	penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial	layanan jaringan dekomntasi dan informasi hukum
		prasita, 2023	pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan locus of control terhadap p	layanan kinerja pegawai
		alya, 2021	analisis kualitas jaringan 4G menggunakan parameter quality of service	layanan jaringan intra instansi
		hidayat, 2023	pembuatan sistem kebakaran ruang server berbasis web	layanan pengaduan pelayanan publik
		efni, 2020	efektivitas sistem layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dalam menir	layanan pengaduan pelayanan publik
		Ummu Kaisum 2019	inovasi pelayanan publik	layanan inovasi dan bisnis

Sumber: Identifikasi dokumen penelitian 2023

Setelah dilakukan analisis dokumen secara tren perkembangan setiap tahunnya dengan melihat tren dokumen secara global yang kemudian dikembangkan dalam cakupan keilmuan penelitian sampai pada cakupan sumber dokumen penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan *e-government* menunjukkan tren positif dengan penelitian yang peneliti lakukan mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang konsepnya adalah penerapan *e-government*.

Pada penelitian yang berlokasi di Diskominfo kota Makassar peneliti menemukan ada 17 dokumen yang menjadi bahan rujukan untuk memetakan cakupan topik penelitian yang berkaitan evaluasi dan *e-government*. Hasil analisis dokumen tersebut ditemukan pada penelitian yang ditemukan oleh (Thamrin, 2019) pada kaitannya sub indikator aplikasi SPBE dengan berjudul “aplikasi sistem informasi Geografis pelayanan publik pada dinas komunikasi dan informatika makassar berbasis android. Tentunya dalam penerapannya aplikasi ini

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik mengenai letak geografis suatu wilayah sehingga orang-orang yang dari luar dari makassar yang berkunjung atau berdomisili mampu menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui titik-titik strategis pelayan publik melalui peta digital yang dilengkapi alamat lokasi, telepon, *maps* yang diakses oleh masyarakat untuk menuju tempat tujuan. Hal yang sama juga pada temuan (Yusmanizar et al., 2020)(Khaidir, 2022)(Halilintar, 2020) pada pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan publik yang kiranya mampu memberikan informasi penting untuk suatu yang sifatnya kepublikan.

Pada implementasinya temuan yang didapatkan oleh (Nur Pratiwi et al., 2023) mengenai layanan informasi SPBE ditemukan untuk proses layanan dibutuhkan responsivitas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan cepat kepada masyarakat. Temuan juga diungkapkan oleh (Aries, 2018) dalam peta rencana SPBE dalam implementasinya penerapan *e-government* pada program *Smart City* menjadi capaian yang penting untuk memberikan petunjuk dan mekanisme dalam mewujudkan program *smart city* yang sejalan dengan peraturan yang mengenai penerapan SPBE. Hal yang sama juga yang di temukan oleh (Wahyuni et al., 2021) Bahwa dibutuhkan tata Kelola yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang arahnya pada pengembangan *smart city*.

Pada kematangan layanan kinerja temuan yang didapatkan oleh (Siswanto, 2020) bahwa dibutuhkan suatu kemampuan khusus dalam membantu kinerja misalnya motivasi dan memberikan pelatihan terhadap pegawai yang memiliki kompetensi serta memberikan kompensasi agar pegawai merasa diperhatikan dihargai atas kinerjanya. Sama halnya disampaikan oleh (

Novitrianinggi, et, el, 2023) bagaimana gaya kepemimpinan transaksional dan *locus of control* yang mempengaruhi kinerja pegawai pada prestasi kerja dengan mendapatkan kepercayaan tinggi. Hal tersebut menjadi kunci dalam penerapan SPBE yang merujuk pada penguatan skill pegawai, prestasi yang menunjang kinerja pegawai.

Pada kematangan manajemen layanan informasi temuan (Surullah, 2023) mengatakan indikator penyediaan informasi, kemudahan akses informasi dengan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan Lembaga non-pemerintah sudah terlaksana, namun dalam implementasinya masih ada hambatan yang menjadi rujukan perbaikan. Temuan itu juga didapatkan oleh (Hafid, 2015) pada kematangan manajemen layanan informasi hukum mengenai penegakan hukum terhadap pengguna media sosial masih sangat kurang karna masyarakat yang melakukan pelanggaran melakukan perbuatan melawan hukum akibat adanya keterbatasan pengetahuan tentang Undang-undang ITE.

Pada penerapan SPBE adanya sistem penghubung layanan instansi yang ditemukan oleh (Arif, 2016) bahwa dalam meningkatkan harmonisasi dikalangan pegawai diperlukan komunikasi yang baik antara instansi yang terkoneksi melalui jaringan. Pada kaitannya dengan layanan intra instansi (Alyah et al., 2021) pada pemanfaatan kualitas jaringan 4G menggunakan parameter Quality Of Service Di Kota Makassar bahwa perlu adanya penguatan terhadap jaringan agar konektivitas antar instansi dalam menyampaikan informasi dan pertukaran informasi bisa berjalan dengan baik. Hal itu juga ditemukan oleh (Lewa, et, el 2019) pada kematangan manajemen keamanan informasi keamanan informasi sebagai

kategori inti yang hanya dapat dicapai melalui kesiapan perangkat aturan (legalware) yang merupakan kondisi kausal pembentuk pengetahuan (knowledge) dan kesadaran keamanan informasi (information security awareness) dalam penyusunan program prioritas serta penyiapan dan pengembangan sistem Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) Kota Cerdas Makassar yang menjadi dasar rumusan teori keamanan informasi Kota Cerdas Makassar.

Pada kematangan layanan pengaduan pelayanan publik ditemukan oleh (Hidayat et al., 2023) pada pembuatan sistem kebakaran ruang server berbasis web pada diskominfo kota makassar menemukan adanya keterkaitan penting pengguna menerima notifikasi kebakaran ketika komponen tersebut mendeteksi gelombang api maupun gas karbon monoksida dan pengguna dapat memantau kondisi ruangan server secara realtime. Hal itu juga dikemukakan oleh (Efni, 2020) pada kematangan pengaduan pelayanan publik pada Implementasi program dari sistem layanan NTPD 112 ini sudah cukup baik meskipun ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan teori efektivitas menurut Campbell yang digunakan dalam penelitian ini dimana dalam salah satu indikatornya yaitu tingkat input dan output dari sistem layanan NTPD 112 ini sudah dapat digunakan masyarakat. Temuan juga pada kematangan layanan inovasi dan bisnis oleh (Kalsum, 2019) pada inovasi pelayanan publik (Studi Kasus Pelayanan Closed Circuit Television (CCTV Di Kota Makassar) bahwa dengan adanya inovasi mampu membantu mengurangi aksi kriminalitas dan memantau seluruh Kawasan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan.

Dari temuan analisis dokumen secara global dengan tren setiap tahunnya maka kaitannya pada penerapan SPBE terhadap 4 domain diuraikan pada uji kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis.

1. Kapabilitas proses

Pada uji kematangan kapabilitas proses maka domain kebijakan, domain tata Kelola, dan domain manajemen.

a. Domain kebijakan internal SPBE

Pada uji tingkat kematangan domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE pada 10 indikator yang telah diuji dalam tingkat kematangan dari level 1-5 ditemukan adanya peningkatan pada indikator 3,5, dan 6. Dimana indikator 3 dan 5 meningkat dari level 3 menjadi level 4. Hal itu dibuktikan dengan hasil penilaian indikator yang telah terintegrasi dan terukur dengan adanya pengaturan yang telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar pelayanan public serta tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja. Indikator 6 mencapai level 5 artinya telah optimum yang ditunjukkan adanya pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas. Selain indikator 3,5 dan 6 masih sesuai dengan penilaian sebelumnya yang tidak mengalami peningkatan level dimana hanya stagnan di level 3 (Murwati, 2022). Sehingga nilai indeks yang diperoleh pada domain kebijakan internal terkait tata kelola SPBE sebanyak 0,45. Sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Bouty et al., 2019) pada evaluasi SPBE di Pemerintah

Kota Gorontalo mengalami peningkatan level yang dimana didasari oleh adanya perbaikan terhadap seluruh perangkat teknologi dan informasi di pemerintah kota gorontalo. Sama halnya pada hasil penelitian (Darmawan, 2022) juga membuktikan adanya peningkatan level dari evaluasi yang telah dilakukan pada domain kebijakan internal yang meningkat setiap tahunnya.

Pada evaluasi arsitektur jaringan yang ditemukan (Sa`di et al., 2023) Penggunaan regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada layanan jaringan intra Pemerintah menjadi acuan utama dalam menaikkan nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan penggunaan Standar tentang penyelenggaraan jaringan, menjadi pendukung dalam implementasi jaringan yang mendukung operasional sistem pemerintah berbasis elektronik. Pada penyusunan arsitektur SPBE pada penelitian (Angelina et al., 2022) perancangan Enterprise Architecture (EA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didapati bahwa penelitian ini menghasilkan blueprint EA yang dirancang dengan menerapkan best practice TOGAF ADM dan PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018, serta disusun melalui Fase Preliminary, Fase Architecture Vision, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Layanan. Setiap tahapan tersebut menghasilkan input dan output terhadap perancangan model EA guna menjadi solusi permasalahan yang dihadapi organisasi.

Hal tersebut juga ditemukan bahwa kebijakan peja rencana SPBE yang ditemukan (Tajuddin & Maulachela, 2021) bahwa kerangka kerja yang menyediakan standar prinsip berbagi teknologi informasi (interoperabilitas) yang dapat digunakan kembali sumber daya di lingkungan instansi pemerintah. Terlebih lagi manfaat FEAF akan lebih lanjut meningkatkan kinerja operasional EA. Peta Jalan SPBE menghasilkan referensi dalam pengembangan SPBE yang mendukung fungsi bisnis untuk masing-masing OPD. Dengan memprioritaskan sistem yang terintegrasi dan memiliki kemampuan interoperabilitas yang baik, sehingga akan berdampak pada peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat. disisi lain temuan yang didapatkan oleh (Muka et al., 2020) bahwa kelemahan utama dalam implementasi SPBE Provinsi Bali, terutama di beberapa OPD yang memberikan layanan publik, adalah belum terintegrasinya aplikasi atau sistem dan masih lemahnya SDM dan infrastruktur IT di masing-masing OPD.

b. Domain tata kelola SPBE

Pada uji tingkat kematangan tata kelola pada aspek perencanaan strategis mencapai nilai 0,30, dan aspek TIK mencapai nilai 0,43, dan aspek penyelenggara SPBE 0,12 dan secara keseluruhan mencapai nilai indeks 0,85. Pada 10 indikator yang di uji pada level tingkat kematangan terjadi peningkatan level dimana indikator 11-14, 16, 19-20 mengalami peningkatan level dari level 1 menjadi level 3. Hal itu dibuktikan pada capaian tingkat kematangan pada kapabilitas proses yang mencapai tahap terstandardisasi dengan pengaturan yang telah ditetapkan dengan memenuhi semua

kebutuhan di instansi pemerintah serta tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi. Kemudian pada indikator 15 mengalami peningkatan dari level 1 menjadi level 4 hal tersebut dibuktikan dengan mencapai tahap terintegrasi dan terukur dengan pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada diskominfo kota Makassar dan pembangunan aplikasi SPBE telah direvie dan di evaluasi secara periodik, dan indikator 17-18 mengalami peningkatan dari level 3 menjadi level 5. Hal tersebut dibuktikan dengan mencapai tahap optimum pada tingkat layanan jaringan intra instansi dan penggunaan sistem penghubung layanan instansi telah di reviu dan dievaluasi serta adanya tindaklanjut sesuai perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2022) bahwa peningkatan level kematangan dipengaruhi oleh perbaikan terhadap beberapa aspek dari aspek perencanaan strategis, TIK, dan penyelenggara SPBE. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Bouty et al., 2019) yang menemukan peningkatan tingkat level yang menunjang penerapan SPBE pada aspek perencanaan strategis, TIK dan penyelenggara SPBE. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2021) bahwa evaluasi pemerintahan berbasis elektronik mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dengan adanya proses perbaikan pada setiap indikator.

Dalam Penyusunan rencana dan anggaran SPBE menurut temuan (Hanum, 2020) Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi

SPBE tahun 2019 untuk Pemerintah Provinsi dikaitkan dengan nilai PAD untuk provinsi yang bersangkutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai PAD yang tinggi tidak menjamin nilai indeks SPBE yang tinggi pula. Pada aspek tata kelola yang ditemukan oleh (Adela Indah Febriani et al., 2022) bahwa Tingkat kematangan arsitektur memiliki transparansi yang digambarkan dengan transparansi pengelolaan oleh pemerintah Kab. Siak dengan tanpa mempertimbangkan keamanan sensitifitas data. Tingkat partisipasi digambarkan dengan adanya kolaborasi antar OPD dan badan sertifikasi dalam perancangannya arsitektur SPBE. Akuntabilitas digambarkan dari sisi pelaksanaan dan administratif agar dapat memantau pelaksanaan output arsitektur SPBE. Koordinasi digambarkan dengan kesesuaian pada regulasi SPBE nasional serta kesamaan paradigma pada anggota pemerintahan Kab. Siak mengenai SPBE.

c. Domain manajemen SPBE

Pada uji kematangan domain manajemen pada aspek penerapan manajemen memperoleh nilai 0,38 dan aspek audit TIK memperoleh nilai 0,15 sehingga nilai indeks keseluruhan mencapai 0,53. Pada uji kematangan pada 11 indikator terjadi peningkatan pada indikator 21-22 dan 24-30 mengalami peningkatan level dari level 1 dan 2 meningkat menjadi level 3. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kematangan pada kapabilitas proses mencapai tahap terstandardisasi dengan pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya sesuai standardisasi. Dan

level 23 dan 31 mencapai level 4 yang sebelumnya hanya dilevel 1. Hal itu dibuktikan pada tingkat kematangan kapabilitas proses mencapai tahap terintegrasi dan terukur dengan pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja.

Sejalan dengan temuan tersebut penelitian yang dikemukakan oleh (Rasid et al., 2022) bahwa faktor manajemen dalam evaluasi SPBE menjadi hal penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam perkembangan teknologi informasi sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Hal itu juga disampaikan oleh (Pratama, 2021) bahwa perlu adanya manajemen SPBE yang menjamin terlaksananya penerapan SPBE yang lebih efektif. Hal tersebut dipertegas pada temuan penelitian yang dilakukan oleh. dimana perlunya manajemen SPBE yang menopang terlaksananya penerapan SPBE terutama pada setiap indikator yang perlu ditingkatkan pada audit TIK, pengelolaan data dan penggunaan aplikasi manajemen yang sesuai dengan standardisasinya.

Pada manajemen risiko menurut temuan (Bisma, 2022) ditemukan 261 risiko yang diidentifikasi yang dapat dikaitkan dengan risiko SPBE. Implementasi Manajemen risiko peneliti menggunakan Cobit5 for risk, ISO 31000:2018 dan KemenPAN RI No 5 2020 untuk dijadikan pedoman dan analisa terhadap manajemen risiko SPBE. sehingga diharapkan penelitian ini dapat sesuai dengan peraturan dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE. Seluruh temuan risiko diberikan rekomendasi

dan sistem pengendalian risiko untuk memperkecil level risiko. Budaya atau penerapan manajemen risiko perlu di tingkatkan dan dioptimalkan terutama di bagian Komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan review yang harus dilakukan secara berkala. Pada temuan (Harisdayanti et al., 2020) Perancangan manajemen risiko operasional SPBE pada kategori risiko infrastruktur, aplikasi, layanan, data dan informasi di Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Permen PANRB No. 5 Tahun 2020, Pada tahap penilaian risiko, teridentifikasi 6 risiko positif dengan mayoritas dengan tingkat risiko tinggi dan 10 risiko negatif dengan mayoritas dengan tingkat risiko sedang. Pada tahap penanganan risiko, untuk risiko positif hanya sebanyak 1 risiko saja yang ditangani dengan opsi pembagian risiko dan untuk risiko negatif sebanyak 8 risiko dengan opsi penanganan mitigasi, penghindaran, dan transfer risiko.

2. Kapabilitas fungsi teknis

Pada uji kematangan kapabilitas fungsi teknis terdapat domain layanan yang diuji.

a. Domain layanan SPBE

Pada uji kematangan domain layanan SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memperoleh nilai 0,17 dan aspek layanan public berbasis elektronik memperoleh nilai 0,72. Sehingga secara keseluruhan nilai indeks memperoleh 1,89. Pada uji kematangan pada 16 indikator mengalami peningkatan pada seluruh indikator, hal tersebut

dibuktikan pada indikator 33,35,36 dan 41 mencapai level 5 pada tahap optimalisasi pada uji kematangan kapabilitas fungsi teknis dengan adanya layanan SPBE yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Sedangkan beberapa indikator lain seperti indikator 32,34,38-40, 42-47 mencapai level 4 pada tahap uji kematangan fungsi teknis dengan adanya kolaborasi dan integrasi antar layanan pemerintah daerah. Dan indikator 37 tidak mengalami peningkatan level.

Sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Bouty et al., 2019) bahwa domain layanan menjadi paling tinggi yang memperoleh peningkatan level dan nilai indeks yang mempengaruhi terhadap kualitas layanan SPBE. Hal yang sama dikemukakan oleh (Darmawan, 2022) bagaimana indeks domain layanan memiliki nilai paling tinggi yang mempengaruhi terhadap proses pelayanan SPBE. Temuan juga dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2022) bahwa dengan adanya kebutuhan layanan dalam SPBE maka mampu memenuhi kepentingan pengguna yang ditunjukkan pada peningkatan level tingkat kematangan pada indikator layanan.

Pada temuan yang dilakukan oleh (Imania & Haryani, 2021) bahwa Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah Kota Surakarta sudah menerapkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi – aplikasi umum pada pemeritahan Kota Surakarta. Aplikasi umum tersebut dapat mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas di Pemerintah Daerah. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik di Kota Surakarta

ditunjukkan dengan adanya aplikasi khusus yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Aplikasi khusus tersebut diantaranya adalah Aplikasi Solo Destination, Aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman, dan berbagai inovasi layanan public berbasis elektronik lainnya. Dimana aplikasi khusus tersebut telah memuat berbagai fitur pelayanan publik berbasis elektronik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerapan *e- government* di Kota Surakarta telah sesuai dengan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang termaktup dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Temuan penelitian oleh (Purnomo, 2023) mengatakan bahwa Capaian Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan pelayanan.

Temuan penelitian oleh (Widia et al., 2021) Evaluasi yang telah dilakukan menghasilkan indeks domain layanan SPBE sebesar 3.16 dengan cakupan terdapat 2 aspek domain, yakni Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik, dengan total

keseluruhan indikator sebesar 16 indikator yang menjadi fokus utama pelaksanaan evaluasi. Namun untuk dapat mempertahankan predikat yang ada serta menjaga dan meningkatkan kualitas penggunaan layanan SPBE maka terdapat rekomendasi yang dapat digunakan sebagai solusi untuk dapat meningkatkan kualitas dan nilai dalam penggunaan layanan SPBE. Rekomendasi perbaikan berupa pengembangan kualitas layanan dengan memperhatikan fitur-fitur yang ada pada layanan penambahan alur kerja atau langkah penggunaan layanan yang mudah dimengerti pengguna yang ada di dalam layanan, selain itu perbaikan dan pengembangan berkelanjutan bisa dilakukan pada aplikasi mobile yang dimiliki oleh tiap layanan.

Pada hasil temuan (Rindhan, 2022) dalam pengelolaan barang milik negara memanfaatkan aplikasi yaitu Si Banter (Sistem Informasi Barang Terintegrasi). Aplikasi si Banter merupakan aplikasi untuk mempermudah monitoring Barang Masuk dan Barang Keluar, mengakses informasi Stock Barang di Gudang dan mempercepat pelayanan terhadap Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Aplikasi ini akan meningkatkan pelayanan serta kinerja Subbagian dan Penyimpanan Barang Milik Negara. Pengembangan aplikasi si Banter akan memudahkan untuk mengetahui informasi. Barang Milik Negara. Informasi ini akan bermanfaat untuk memonitoring dan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan pengembangan aplikasi si Banter akan meningkatkan pelayanan pengelolaan Barang Milik Negara.

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada ke4 domain dengan analisis data studi Pustaka maka perlu adanya evaluasi pada setiap indikator dalam peningkatan kualitas layanan. Hal itu juga menjadi kunci bagaimana setiap instansi merespon terhadap kendala yang dihadapi. Hal tersebut perlu dilakukan penguatan terhadap kebijakan terkait tata Kelola SPBE sehingga terwujudnya layanan yang saling berintegrasi. Pengembangan itu juga perlu pada penyediaan sarana infrastruktur Teknologi informasi sebagai bagian penting dalam membangun sarana infrastruktur jaringan.

Dalam Pembangunan SPBE diperlukan adanya penyusunan mengenai rencana anggaran SPBE yang terintegrasi dan terukur agar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan bisa maksimal sesuai dengan peta rencana pembangunan SPBE.

Pada dasarnya dalam implementasi SPBE perlu adanya inovasi agar tampilan pada aplikasi layanan bisa lebih menarik untuk diakses oleh publik. Tidak hanya itu manajemen keamanan SPBE perlu menjadi perhatian besar agar data publik tidak mudah untuk diretas oleh hacker. Kerahasiaan data pribadi menjadi hal penting bagaimana peran manajemen data yang terkoneksi dengan sistem keamanan yang berlapis agar data publik yang sifatnya rahasia bisa terjaga.

Pada implikasinya pada keamanan data dimana perlu manajemen risiko yang diharapkan mampu menangkal permasalahan yang terjadi baik secara teknis maupun non-teknis minimal mampu memperkecil risiko bilamana

terdapat sistem aplikasi yang terkendala jaringan yang mengakibatkan pelayanan terganggu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan tingkat level kematangan dengan capaian indeks yang signifikan mengalami perubahan ke tingkatan berikutnya. namun tidak mampu menjamin pelayanan bisa berjalan dengan baik. Namun dengan adanya kebijakan internal yang menjadi kunci implementasi penerapan SPBE. Dan juga adanya tata Kelola yang mampu mendesain bagaimana kebutuhan baik dari segi perencanaan strategi SPBE, ketersediaan teknologi informasi, dan penyelenggara SPBE. Serta adanya manajemen yang berkaitan dengan risiko, keamanan data, manajemen aset, pengelolaan sumber daya serta bagaimana ketersediaan audit infrastruktur dan audit penggunaan aplikasi yang menjadi bentuk kesadaran untuk melakukan perubahan dari kondisi pengaruh eksternal dan internal pada setiap instansi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

Indeks domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE mencapai nilai indeks 0,45. Indeks domain tata kelola SPBE pada aspek perencanaan strategis mencapai nilai 0,30, aspek TIK mencapai nilai 0,43, dan aspek penyelenggara SPBE mencapai nilai 0,12. Sehingga secara keseluruhan mencapai nilai indeks 0,85. Indeks domain manajemen SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE mencapai nilai 0,38, dan aspek audit TIK 0,15. Sehingga secara keseluruhan mencapai nilai indeks 0,53. Indeks domain layanan SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik mencapai nilai 0,17 dan aspek layanan publik berbasis elektronik mencapai nilai 0,72. Sehingga secara keseluruhan mencapai nilai indeks 1,89.

Jadi hasil pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah kota Makassar dari ke-4 domain kebijakan SPBE 0,45, domain tata kelola SPBE 0,85, domain manajemen SPBE 0,53, dan domain layanan SPBE 1,89. Sehingga secara keseluruhan diakumulasikan mencapai nilai 3,71 dengan predikat indeks capaian “Sangat Baik”. Sesuai penilaian tingkat kematangan pada tahun 2022 di Diskominfo Kota Makassar yang hanya mencapai nilai 2,45 dengan predikat “cukup” sehingga pada evaluasi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan,

sehingga mencapai predikat “Sangat Baik” hal ini menjadi capaian terbaik pada penerapan SPBE di Kota Makassar.

Walaupun tingkat kematangan meningkat secara signifikan dengan capaian indeks yang meningkat, itu tidak bisa menjamin pelayanan publik berjalan semaksimal mungkin. Namun dengan capaian nilai indeks yang tinggi menjadi kunci bagaimana setiap instansi harus memperhatikan bagaimana informasi bisa sampai kepada publik dengan baik. Kemudian memastikan ketersediaan layanan yang terintegrasi yang menjamin keamanan data pengguna dengan memiliki manajemen risiko sehingga permasalahan yang timbul bisa diselesaikan dengan baik agar terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal tersebut dikuatkan pada penggunaan alat analisis dengan citasi dokumen melalui VosViewer bahwa tren dokumen secara global relevan terhadap penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan *e-government* dan dokumen penelitian yang berlokasi di Diskominfo Kota Makassar membuktikan relevansi yang menguatkan terhadap tema penelitian yang menguji tingkat kematangan SPBE pada penerapan *e-government*.

B. Saran

Dalam proses pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar direkomendasikan yaitu:

1. Meningkatkan capaian level pada setiap indikator.
2. Melengkapi indikator yang mengalami penurunan level.

3. Memperbaiki setiap indikator dalam kelengkapannya sesuai standardisasi capaian indeks SPBE yang mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b) Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c) Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Shanab, E. A. (2020). E-government contribution to better performance by public sector. *Open Government: Concepts, Methodologies* <https://www.igi-global.com/chapter/e-government-contribution-to-better-performance-by-public-sector/235170>
- Adela Indah Febriani, Hasanuddin, & M.Saeri. (2022). Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 580–588.
- Alshaher, A. (2020). IT capabilities as a fundamental of electronic government system success in developing countries from users perspectives. *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-05-2020-0080>
- Alyah, A. F., Andayani, D. D., & Syahrul. (2021). Analisis Kualitas Jaringan 4G Menggunakan Parameter Quality of Service di Kota Makassar. *Teknik Informatika Dan Komputer, Jurusan Teknik Informatika Dan Komputer Universitas Negeri Makassar*, 1–5.
- Amalia, E. (2021). *Model Kematangan e-Government Berdasarkan SPBE Menpan Tahun 2018*. 5(1), 52–68.
- Angelina, T., Fajrillah, A. A. N., & Hanafi, R. (2022). Penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 16(2), 85. <https://doi.org/10.32815/jitika.v16i2.762>
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), hlm. 1593.
- Aries, M. S. (2018). *Manajemen Perkotaan Berbasis E-government pada program Smart city di kota makassar*. Unismuh Makassar.
- Arif, R. B. L. (2016). *Aktivitas Human Relations Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika kota Makassar dalam meningkatkan harmonisasi dikalangan pegawai*. UIN Alauddin.
- Ayu, K., Aryanti, F., Sukarsa, I. M., Agung, A., & Hary, N. (2022). *The Study of E-Government Implementation in Indonesia*. 10(1), 1–11.
- Bastian. (2003). *Perkembangan “E-Government” di Indonesia*. Sinar Harapan.

- Bisma, R. (2022). Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan. *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, 6(2), 73–79. <https://doi.org/10.26740/jieet.v6n2.p73-79>
- Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1). <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758>
- Chasin, F., & Scholta, H. (2015). *Taking Peer-to-Peer Sharing and Collaborative Consumption onto the Next Level - New Opportunities and Challenges for E-Government*. May. <https://doi.org/10.18151/7217288>
- Darmawan, I. (2022). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis. *JANITRA (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, 2(April), 13–24.
- Efni, S. Z. (2020). *Efektivitas Sistem layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dalam Meningkatkan Pelayanan Pubik Oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika kota Makassar*.
- Eriyanto riyudian Rasid, F., H Pramono, S., & N Rizal, M. (2022). Peranan Manajemen Pengetahuan Dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 209–214. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5284>
- Hafid, M. taufiq. (2015). *Penega Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di kota Makassar*. Unhas.
- Hajaroh, M. (2019). POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Halilintar, M. A. P. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Diskominfo Kota Makassar sebagai Alat Komunikasi dalam Menyampaikan informasi kepada Masyarakat Kota Makassar*.
- Hanum, Y. (2020). Keterkaitan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 136–142. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2596>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Harisdayanti, D., Fauzi, R., & ... (2020). Perancangan Manajemen Risiko

Operasional Pada Spbe/e-government Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten *EProceedings ...*, 7(2), 7364–7372.

<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/12774%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/download/12774/12497>

Hiller, J. S., & Bélanger, F. (2001). Privacy Strategies for Electronic Government. *Center for Global Electronic Commerce*, 40. <http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf>

Ida Samidah, D. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. PT. RajaGrafindo Persada.

Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Wacana Publik*, 1(1), 176. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>

Indrajit, R. E. . (2006). *Elektronic Governement Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Digital*. Andi.

Kalsum, U. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayan Closed Circuit Television (CCTV) DI Kota Makassar)*.

Kamaruddin, K. A., & Noor, N. L. M. (2017). From e-government to t-government: A Malaysian citizens' readiness study. ... of *Telecommunication, Electronic* <https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/2671>

Kanaan, A., Al-Hawamleh, A., Abulfaraj, A., Al-Kaseasbeh, H. M., & Alorfi, A. H. (2023). The effect of quality, security and privacy factors on trust and intention to use e-government services. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 185–198. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.11.004>

Khaidir, S. N. F. (2022). *Etika Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Ruang Media Sosial Terhadap Penanganan Covid-19 Dikota makassar*. Unismuh Makassar.

Khan, A., & Krishnan, S. (2019). International Journal of Information Management Conceptualizing the impact of corruption in national institutions and national stakeholder service systems on e-government maturity. *International Journal of Information Management*, 46(March 2018), 23–36. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.014>

Kurfali, M., Arifoglu, A., Tokdemir, G., & Pacin, Y. (2017). *Adoption of e-*

government services in Turkey. 66, 168–178.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.041>

Kurniati, P. S., Sholihin, I., Winarta, R., & Ihsan, M. H. (2021). International Journal of Computer in Law & Political Science Information Technology Policy through the E- Government Programs in Improving Public Services Quality. *International Journal of Computer in Law & Political Science (INJUCOLPOS)*, 1, 1–8.

Lessa, L. (2019). Sustainability framework for e-government success: Feasibility assessment. ... *Conference on Theory and Practice of Electronic ...*.
<https://doi.org/10.1145/3326365.3326396>

Lewa, H. K., & dkk. (2019). Strategi Keamanan Informasi Kota Cerdas Makassar Dalam Menghadapi Ancaman dan Tantangan di Ruang Siber. *Peperangan Asimetrik*, 81–94. <http://139.255.245.7/index.php/PA/article/view/370>

M, W. H., Imam, K., Jumadil, M. J., Safi, A., Leo, M. A., Faris, A., & Faruq, A. (2023). *Pembuatan Sistem Kebakaran Ruang Server Berbasis Web pada DISKOMINFO Kota Makassar*. 01, 25–39.

Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173(July), 121102.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>

Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 19(1), 51. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.19.1.2017.51-62>

Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. G. D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253–276.
<https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i3.142>

Murwati, N. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Pemerintah Kota Makassar*.
 file:///D:/Skripsi ANDI MAPPIARE/SPBE/Laporan_Hasil_Pemantauan_-_Pemerintah_Kota_Makassar.pdf

Nur Pratiwi, O., Nahrudin, Z., Nur Aina, A., & Arifin, I. (2023). Responsivitas Pemerintah Melalui Elektronik Government (E-Gov) Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 61–81.
<https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.2255>

Osei-Kojo, A. (2017). E-government and public service quality in Ghana. *Journal of Public Affairs*, 17(3), 1–8. <https://doi.org/10.1002/pa.1620>

- Prasetyo, B., Adnan, F., & Syahputra, R. A. (2022). Evaluasi Kualitas Layanan Electronic Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) Di Kabupaten Banyuwangi Menggunakan Metode E-GovQual dan Importance Performance Analysis. *Jurnal Tekno Kompak*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.33365/jtk.v16i1.1857>
- Prasita Novitrianinggit, Abdul Rahman Kadir, S. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Dan Locus of Control Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dalam Lingkungan Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maros. *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 e-ISSN : 2656-775X PENDAHULUAN*, 5, 69–79.
- Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116–4124.
- Purnomo, S. J. (2023). Mewujudkan Pelayanan Publik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Peran Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Pada 2018-2023. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 98–112. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.189>
- Rais, M., Razak, R., Mustanir, A., & Madani, M. (2021). *Effects of ICT Application (Information Communication and Technology) Towards the Transformation of Regional Bureaucracy*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003>
- Ramli, M. F. (2020). *Impelementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Rifan Alun Pratama, Dine Meigawati, A. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sukabumi Particioatory Responder (Super) Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Sukabum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 453. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/5871/pdf>
- Rindhan, A. C. (2022). *Implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik*.
- Sa`di, A., Andriani, R., & Ghozali, B. (2023). Evaluasi Arsitektur Jaringan Komputer Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Eelektronik (Spbe). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 158–162. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.6136>

- Siswanto, A. (2020). Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 1–35. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3417>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA CV.
- Surullah, S. A. h. (2023). *Transparans Informasi dan Komunikasi Publik Media Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar*. Unismuh Makassar.
- Syahrani Qotrunnisa, A. (2021). Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pemerintah Daerah Kuningan. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 4(3), 187–192. <https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3424>
- Syahza, A. (2021). *Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021* (Issue September).
- Tajuddin, M., & Maulachela, A. B. (2021). Integrasi Dan Interpoerabilitas Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Menggunakan Federal Enterprise *Seminar Nasional Sistem* <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/373>
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan publik yang membumi : konsep, strategi & kasus* (1st ed.). ukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Thamrin, M. (2019). *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar Berbasis Android*.
- Usman, H. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* (R. Rachmatika (ed.); 2nd ed.). PT Bumi Aksara.
- Wahyuni, S., Alwi, & Indrayati Nur Indar, N. (2021). Strategi Implementasi Smart Governance di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 376–397. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Widia, A., Putri, D., Abdurrahman, L., & Nugraha, R. A. (2021). *Evaluation of the Electronic-Based Government System Using the Regulation of the Minister of Pan-Rb Number 59 of 2020 Concerning Monitoring and Evaluation of Spbe on the Service Domain in Diskominfo City of Bandung*. 8(5), 9181–9189.
- Widyantini, R. (2021). Sembilan instansi Pemerintah Raih Predikat Sangat Baik

Evaluasi SPBE 2021. *Panrb BerAKHLAK*. [https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sembilan-instansi-pemerintah-raih-predikat-sangat-baik-evaluasi-spbe-2021#:~:text=Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB,hasil evaluasi tahun 2021 menghasilkan indeks SPBE 2%2C24.](https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sembilan-instansi-pemerintah-raih-predikat-sangat-baik-evaluasi-spbe-2021#:~:text=Deputi%20bidang%20Kelembagaan%20dan%20Tata%20Laksana%20Kementerian%20PANRB,hasil%20evaluasi%20tahun%202021%20menghasilkan%20indeks%20SPBE%202%2C24.)

Yudianto, S. ikhsan N. N. A. I. (2021). *analysis of factors affecting the level of e-government implementation in west java*. 5(1), 123–134.

Yusmanizar, Thahir, Unde, A., & Muhammad Yunus. (2020). Analisis Karakteristik Penggunaan Media Sosial Pada. *Jurnalisa*, 06(November), 200–215. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/16263/11055>



LAMPIRAN

A. Dokumentasi evaluasi SPBE melalui website spbe.makassarkota.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah kota Makassar.

No	Domain	Indikator	Target Level	Level Tercapai	Indeks Tercapai	OPD/Badan	Status	Aksi
1	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 1- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL TERKAIT STRUKTUR SPBE INSTANSI PUSAT PEMERINTAH DAERAH	Tingkat 3	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG APLIKASI	Terpenuhi	[Download] [Print]
2	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 2- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL TERKAIT PETA KELOMPOK SPBE INSTANSI PUSAT PEMERINTAH DAERAH	Tingkat 3	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG APLIKASI	Terpenuhi	[Download] [Print]
3	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 3- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL TERKAIT MANAJEMEN DATA	Tingkat 4	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK	Terpenuhi	[Download] [Print]
4	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 4- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL TERKAIT PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE	Tingkat 3	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG APLIKASI	Terpenuhi	[Download] [Print]
5	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 5- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL TERKAIT KEAMANAN PUSAT DATA	Tingkat 4	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - LITDI OPERATOR ROOM	Terpenuhi	[Download] [Print]
6	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 6- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL LAYANAN LAINNYA MISALNYA INSTANSI PUSAT PEMERINTAH DAERAH	Tingkat 6	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG APLIKASI	Terpenuhi	[Download] [Print]
7	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 7- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGUNAN LAYANAN INSTANSI PUSAT PEMERINTAH DAERAH	Tingkat 3	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG APLIKASI BAHAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terpenuhi	[Download] [Print]
8	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 8- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL KEAMANAN INFORMASI	Tingkat 3	Leve	0.04	DINAS KOMINFO - BIDANG PERENCANAAN	Terpenuhi	[Download] [Print]
9	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 9- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL AUDIT BERPIKIRAN INFRASTRUKTUR DAN KOMPONEN	Tingkat 3	Leve	0.03	DINAS KOMINFO - BIDANG PERENCANAAN	Terpenuhi	[Download] [Print]
10	KEBLIAKAN SPBE	Indikator 10- TINGKAT KEMATANGAN KEBLIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE INSTANSI PUSAT PEMERINTAH DAERAH	Tingkat 3	Leve	0.05	PROTOKOL SETDA KOTA MAKASSAR BAGIAN KERASAMA SETDA KOTA MAKASSAR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KOTA MAKASSAR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KOTA MAKASSAR	Terpenuhi	[Download] [Print]

Showing 1 to 10 of 46 entries

Copyright © 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar. All rights reserved. Version 1.0.0

B. Dokumentasi pelaksanaan evaluasi SPBE



C. Surat menyurat


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)965588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1665/05/C.4-VIII/VI/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Dzulqa'dah 1444 H
 05 June 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0844/RS/FA.1-VIII/VI/1444 H/2023 M tanggal 5 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ANDI MAPPIARE
 No. Stambuk : 10561 1121319
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"EVALUASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Juni 2023 s/d 8 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan *inshallahu khaeran*


 Ketua LP3M,


 Abubakar Idhan,MP.
 101 7716

06-23

Surat izin dari DPM-PTSP Provinsi Sulawesi selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 18530/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.	
Lampiran	: -	Walikota Makassar	
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1865/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDIMAPPIARE
Nomor Pokok	: 105611121319
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EVALUASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl- **08 Juni s/d 08 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Juni 2023

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Peringgal*.

Surat izin penelitian di Diskominfo Kota Makassar

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 - 4671729
E-Mail : diskominfo@makassar.go.id Home Page : <http://makassarkota.go.id>

Makassar, 21 Juni 2023

Nomor : 800/ 2823/DISKOM/VI/2023
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Th. Saudara Andi Mappiare
Di-
Makassar

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Makassar Nomor : 070/647/SKP/DPMPSTP/VI/2023, Tanggal 14 Juni 2023, Perihal Surat Keterangan Penelitian, oleh :

Nama : **ANDI MAPPIARE**
NIM/Jurusan : 105611121319 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"EVALUASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SPBE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR"**

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terhitung mulai Tanggal 7 Juni sampai dengan 8 Agustus 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS


ISMAWATY NUR, ST., M.Sc., Ph.D
Pangkat : Pembina
NIP. 19740607 200411 2 001


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Mappiare
 Nim : 1050112110
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Dengan nilai :

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10%
2	Bab 2	16%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	6%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurhidayah S. Hum, M.I.P.
 UPT-Perpustakaan dan Penerbitan 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



BAB I - Andi Mappiare
105611121319
by Tahap Tutup

Submission date: 21-Jul-2023 08:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134540397

File name: BAB_I_8.docx (45.2K)

Word count: 1127

Character count: 7967

BAB I - Andi Mappiare 105611121319

ORIGINALITY REPORT

8%	9%	7%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ docplayer.info
Internet Source





BAB II. Anni Meppiare

105011121319

by Tahap Tutup

Submission date: 21 Jul 2023 08:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134540193

File name: BAB_II_8.docx (69.2K)

Word count: 4003

Character count: 27957

BAB II - Andi Mappiare 105611121319

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ repository.umy.ac.id

Internet Source



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches = 2%



BAB III - Andi Mappiare
105611121319

by Tahap Tutup

Submission date: 21 Jul 2023 08:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2124539939

File name: BAB_III_9.docx (51,02K)

Word count: 504

Character count: 3466

BAB III - Andi Mappiare 105611121319

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ repository.uinjkt.ac.id
Internet Source



BAB IV - Andi Mappiare

105511121319

by Tahap Tutup



Submission date: 21-Jul-2023 08:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134539689

File name: BAB_IV_B.docx (291.26K)

Word count: 4815

Character count: 31569

BAB IV - Andi Mappiare 105611121319

ORIGINALITY REPORT



MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ pdfcoffee.com
Internet source



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches



Submission date: 21-Jul-2023 08:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134539470

File name: BAB_v_8.docx (1,017.1K)

Word count: 1580

Character count: 11449

BAB V - Andi Mappiare 105611121319

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ news.google.com
Internet Source



RIWAYAT HIDUP



ANDI MAPPIARE, dilahirkan di Singa pada tanggal 24 Maret 1997 merupakan anak kedua dari dua bersaudara, memiliki saudara bernama Andi Petta Solo Daeng Tuppu serta merupakan anak dari pasangan Andi Massaerang(alm) dan Andi Bone, Penulis beragama islam dan tinggal di Desa

Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Jenjang Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar 254 Banyoro Pada tahun 2009, SMP Negeri 28 Bulukumba pada tahun 2012 , SMA Negeri 6 Bulukumba pada tahun 2015 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu. Penulis berharap mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang Ilmu Administrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua dan keluarga serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga masyarakat, bangsa dan Negara.